

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATENSI

Edisi Desember II 2020

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Drs. Chairul Anwar Apt.

Pemerintah **Wajib** Ikuti Protokol Obat

Dalam Polemik Ketidakjelasan Vaksin

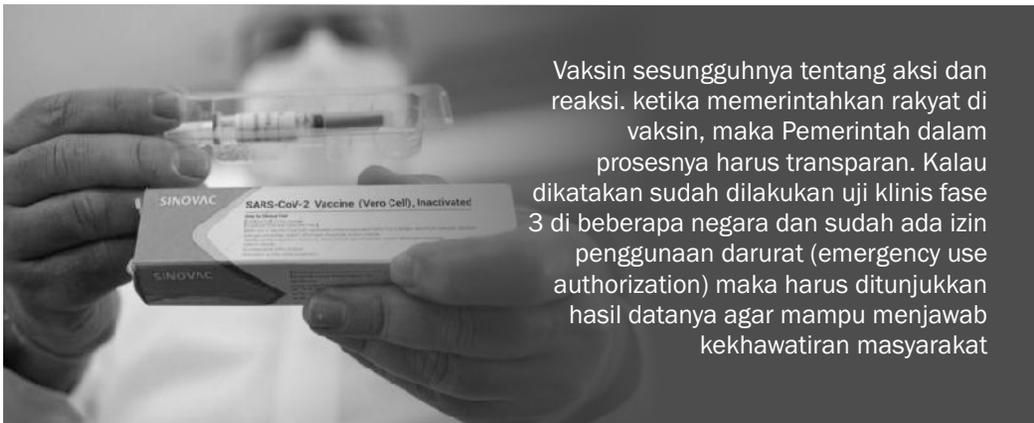


Vaksin Gratis dan Aman, **Perlu!**

Indonesia secara resmi telah menentukan Vaksin Sino-vac untuk mencegah wabah covid 19.

Tahap awal sebanyak 1,2 juta spesimen telah sampai beberapa waktu lalu. Setelah mengkaji kembali kondisi keuangan negara, presiden Jokowi menegaskan bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada seluruh masyarakat dan memerintahkan jajarannya agar tidak ada seorangpun yang tidak divaksinasi. Presiden Jokowi menjamin bahwa vaksin yang diberikan sudah terbukti aman secara klinis dan dirinya akan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi tersebut.

Vaksin sesungguhnya tentang aksi dan reaksi. ketika memerintahkan rakyat di vaksin, maka Pemerintah dalam prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization)



maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.

Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk.

Apalagi ditengarai adanya ketidakberesan dalam proses Importasi Vaksin Covid 19 yang datang dari Tiongkok. Selain masih terganjal permasalahan uji klinis, vaksin yang diimpor tersebut juga belum

mendapatkan izin edar dari Badan POM dan kehalalan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kita khawatir kebijakan “zig zag” dan “maju mundur” seperti ini akan semakin meningkatkan angka covid 19 di Indonesia. Mitigasi yang buruk dan penanganan yang buruk telah berlalu berbulan-bulan. Semoga dengan ganti menteri, ada banyak perubahan berarti.

Dalam melakukan penerapan terhadap vaksin covid 19. Maka sudah sepantasnya

Vaksin sesungguhnya tentang aksi dan reaksi. ketika memerintahkan rakyat di vaksin, maka Pemerintah dalam prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat

ikutilah "protokol obat". Dari mulai indikasi, efikasi, efek samping serta efektivitasnya. Juga keamanan, importasi dari mulai pembelian sampai cara mendatangkan dan pemakaian dari vaksin tersebut.

Bahwa obat yang barangnya sedikit jika tidak tepat pemakaian, dosis serta ukurannya maka bukan menyembuhkan tapi berbahaya. Artinya mengenai faktor keamanan dari obat merupakan hal yang paling terpenting.

Biarlah mahal sedikit tapi rakyat terlindungi, jangan

sampai berfikir murah tapi rakyat menjadi korban. Sebagaimana dipahami bahwa kontraindikasi dari obat akan muncul setelahnya. Jangan sampai obat yang didatangkan bisa memakan korban.

Karena selama delapan bulan lebih kita sudah banyak yang berkorban, harta dan nyawa. Maka penerapan vaksin harus dipastikan tidak memakan korban. Apalagi jika dikemudian hari ditemukan ada yang bermain sebagaimana penyalahgunaan bansos. sungguh terlaru.

Anggota FPKS Tengarai adanya Ketidakberesan dalam Importasi Vaksin Covid 19

KUTIPAN

Jakarta (13/12) --- Anggota Komis II DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, menengarai adanya ketidakberesan dalam proses Importasi Vaksin Covid 19 yang datang dari Tiongkok.

"Kami melihat ada ketidakberesan yang terjadi dalam proses importasi Vaksin dari Tiongkok pekan lalu. Setidaknya ada 3 hal yang mengundang pertanyaan dari berbagai pihak terkait datangnya vaksin sebanyak 1,2 juta dosis itu," ungkap Chairul di Jakarta Minggu (13/12).

Kegagalan pertama adalah masih belum selesainya proses uji klinis yang sedang dilakukan, beberapa prosedur yang harusnya dilewati dalam proses uji klinis tersebut.

"Kamrin ada pernyataan dari Tim Mikrobiologi Uji Klinis Vaksin Sinovac Universitas Padjadjaran dr Sunaryati Sudigdoadi mengatakan

pihaknya baru bisa melaporkan hasil uji klinis vaksin pada Akhir Januari, itu artinya vaksin ini masih belum lolos uji klinis. Kenapa ada pihak-pihak yang tergesa-gesa untuk melakukan impor, bagaimana jika terjadi kegagalan dalam proses uji klinis tersebut?," tanya anggota DPR RI Dapil Riau 1.

Selain masih terganjal permasalahan uji klinis, vaksin yang diimpor tersebut juga belum mendapatkan ijin edar dari Badan POM.

"Vaksin baru bisa didistribusikan ke daerah dan masyarakat setelah mendapat sertifikat pengujian (lot release) dari Badan POM, dan baru

dapat digunakan setelah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM. Semua prosedur ini harus dilalui sebelum ada proses importasi," ungkap Chairul.

Hal yang terakhir dan yang penting juga, lanjutnya, adalah belum adanya proses pengujian terhadap kehalalan vaksin yang sudah diimpor tersebut yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Biar bagaimana pun mayoritas masyarakat Muslim Indonesia berharap ada keamanan dari segi kehalalan vaksin yang akan mereka dapatkan," jelas Chairul.

Chairul Anwar mendesak kepada Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap proses importasi vaksin tersebut.

"Kami meminta kepada Ombudsman RI sebagai badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, untuk segera melakukan pengawasan terhadap proses importasi Vaksin Covid 19 ini. Dana yang digunakan untuk mengimpor vaksin tersebut berasal dari anggaran negara dan hal ini sangat berkaitan terhadap pelayanan publik,"desak Anggota Komisi II yang bergelar profesi apoteker ini.

Selain itu Chairul juga merasa heran kenapa sudah ada beberapa institusi kesaha-



Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.
Anggota Fraksi PKS DPR RI

"Kami juga merasa heran kenapa ada beberapa institusi kesehatan swasta yang sudah membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, padahal vaksin yang akan diberikan belum ada ijin edar dari Badan POM.

tan swasta yang membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

"Kami juga merasa heran kenapa ada beberapa institusi kesehatan swasta yang sudah membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, padahal vaksin yang akan diberikan belum ada ijin

edar dari Badan POM. Itu sama seperti menjual barang yang belum boleh didaftarkan di masyarakat. Kami meminta Ombudsman juga mengawasi hal ini," desak Politisi PKS asal Riau ini.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADULAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS sudah perjuangankan

“Vaksin Covid-19 gratis dan presiden Jokowi pihak pertama yg disuntik vaksin. Alhamdulillah.”

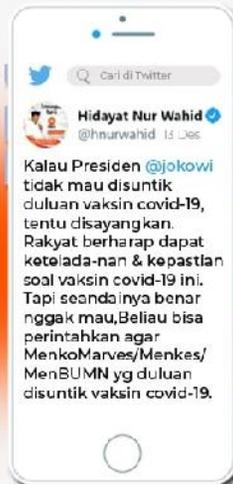
From This



21 Oktober 2020
22:47 WIB



9 Desember 2020
19.30 WIB



13 Desember 2020
11.58 WIB



16 Desember 2020
08.58 WIB



16 Desember 2020
14.42 WIB



BPOM **Harus** Profesional Periksa Vaksin Covid-19 Impor

99 KUTIPAN

Saya yakin ukuran-ukuran ilmiah itu sudah baku. Indikatornya jelas. Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah maka tipu-tipu ilmiah, yang akan merugikan masyarakat, dapat dihindari. IDI dalam rekomendasinya kepada Menkes juga menyatakan hal yang sama, bahwa vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya. Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI





Wakil Ketua FPKS Ingatkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin Sinovac Harus Objektif

KUTIPAN

Jakarta (17/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta para peneliti yang terlibat dalam proses uji klinis fase 3 vaksin Sinovac untuk bersikap profesional.

Menurut Mulyanto, peneliti harus objektif dan berani menyampaikan hasil uji tersebut apa adanya.

"Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu peneliti membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta," tegas Mulyanto.

Mulyanto menegaskan uji klinis fase 3 ini sangat penting untuk menilai efektivitas dan imunogenitas vaksin yang sudah dibeli Pemerintah.

"Sebab berdasarkan daftar efektivitas vaksin yang disebutkan WHO, vaksin Sinovac tidak tertera di dalamnya. Untuk itu vaksin Sinovac yang sudah dibeli harus

diuji. Jangan sampai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini malah berbahaya," tegas Mulyanto.

Sebelumnya Pemerintah dilaporkan sudah membeli vaksin Sinovac sebanyak 3 juta dosis. Sejumlah 1,2 juta dosis sudah diterima sedangkan sisanya menyusul kemudian.

"Sekarang ini status vaksin Sinovac tengah uji klinis fase 3 oleh tim peneliti FK Unpad. Saya berharap para ilmuwan kedokteran yg terlibat riset ini menjagi garda ilmiah yang mengayomi kesehatan masyarakat. Mereka tidak boleh goyah apalagi ingkar dari Hippocratic Oath, sumpah etis

mereka. Jangan sampai mereka tergiur pada rayuan manis pebisnis vaksin atau takut pada tekanan pihak-pihak yg tidak bertanggung-jawab," ujar Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan peran peneliti uji klinis fase 3 ini sangat menentukan nasib kesehatan jutaan masyarakat Indonesia.

"Masyarakat sangat berharap para peneliti ini bersikap rasional, obyektif, dan independen, sehingga hasil riset yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kondisi yg sebenarnya di lapangan. Jangan sampai ada tipu-tipu ilmiah. Jika perlu dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

"Kita bertanggung jawab membangun integritas kelembagaan ilmiah nasional agar evidence based atau research based policy (kebijakan berbasis riset) dapat dijalankan dengan baik dan dipercaya publik," tandas Mulyanto.



Masyarakat sangat berharap para peneliti ini bersikap rasional, obyektif, dan independen, sehingga hasil riset yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jangan sampai ada tipu-tipu ilmiah. Jika perlu dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Aleg PKS Pertanyakan Keputusan Pemerintah Beli Vaksin Jadi Sinovac

KUTIPAN

Pembelian vaksin jadi Sinovac ini telah membuat masyarakat, termasuk anggota DPR, bingung. Karena vaksin ini belum teruji keampuhannya dan tidak sesuai dengan strategi awal pemerintah.

Jakarta (12/12) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mempertanyakan keputusan pemerintah yang secara tiba-tiba membeli vaksin jadi Sinovac.

"Saya secara pribadi tadi meminta penjelasan dari pak Menteri (Menkes). Karena memang seperti yang disebutkan dalam Perpres No 90 Tahun 2020, kemudian juga diikuti dengan PMK No.28, kemudian kepmenkes 98/60, itu semuanya menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menkes, adalah pihak yang menentukan pada saat memilih vaksin yang akan dibeli, dikerjasamakan, atau kemudian ditunjuk melalui penunjukkan langsung", ujar Netty dalam keterangannya kepada TV Parlemen pasca

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang DPR RI, (11/12).

Menurutnya, pembelian vaksin jadi Sinovac ini telah membuat masyarakat, termasuk anggota DPR, bingung. Karena vaksin ini belum teruji keampuhannya dan tidak sesuai dengan strategi awal pemerintah.

"Nah, kalau kemudian tiba-tiba muncul Sinovac dalam bentuk vaksin jadi, ini kan membuat kita bingung ya, boro-boro masyarakat, anggota DPR RI juga bingung sebetulnya. Kenapa? Karena rapat pada 31 Agustus menjelaskan strategi mendapatkan vaksin itu dua, satu mengembangkan vaksin merah putih, dan yang kedua adalah strategi diplomasi. Yg waktu itu disebutkan adalah vaksin Sinovac yang sedang dilakukan uji klinis tahap tiga di

Indonesia. Dan uji klinis itu belum selesai, interimnya juga baru nanti awal 2021, kok tiba-tiba pemerintah memutuskan membeli vaksin jadi. (Padahal) vaksin jadi Sinovac ini menurut referensi, efektivitasnya belum teruji, begitu", jelas anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat ini.

Di saat yang sama, Netty pun mengkritisi rencana pemerintah untuk memberikan vaksin yang belum teruji tersebut ke para tenaga kesehatan. Menurutnya, hal itu sangat tidak relevan dan berisiko tinggi.

"Nah, kemudian menurut ITAGI, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, (vaksin ini) akan diberikan prioritas kepada tenaga kesehatan, frontliners. Bagaimana mungkin sebuah vaksin yang belum teruji efektivitasnya, kebermanfaatannya, diberikan kepada frontliners, yang hari ini kita tahu bahwa untuk mencetak satu tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, butuh waktu dan proses yang panjang", pungkas Netty.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Saya secara pribadi tadi meminta penjelasan dari pak Menteri (Menkes). Karena memang seperti yang disebutkan dalam Perpres No 90 Tahun 2020, kemudian juga diikuti dengan PMK No.28, kemudian kepmenkes 98/60, itu semuanya menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menkes, adalah pihak yang menentukan pada saat memilih vaksin yang akan dibeli, dikerjasamakan, atau kemudian ditunjuk melalui penunjukkan langsung.

JALAN BERLIKU VAKSIN GRATIS*



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERwakilan RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

“ Pada (11/9), Menteri BUMN Erick Thohir sempat melempar usulan agar **masyarakat yang memiliki uang untuk membayar sendiri biaya vaksinasi**. Menurutnya, jika sistem vaksin berbayar, maka itu akan bisa membantu keuangan negara. ”



“ Pada Kepmenken Nomor HK.01.07/Menkes/99860/2020 yang diteken Terawan pada 3 Desember. MENKES Terawan mengatur dua skema vaksinasi: **“Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program dilakukan oleh MENKES dan untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan oleh Menteri BUMN”** demikian bunyi poin kelima Kepmen tersebut. ”



“ Saat vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada awal Desember (6/12), **Menko Perekonomian Airlangga Hartarto** menyebut vaksinasi akan dilakukan pada **67 persen** dari 160 juta populasi berusia 18-59 tahun atau sekitar **107,2 juta orang**. Dari angka itu, **hanya 30 persen yang mendapatkan vaksin gratis**. ”



“ Pada (16/12), 14.42 WIB **Presiden RI Jokowi** mengumumkan **vaksin Covid-19 di Indonesia akan didistribusikan secara gratis** dan dia akan jadi orang pertama yang disuntik vaksin di Indonesia. ”



“ Pada (16/12), 16.43 WIB. **Jubir Program Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi** mengatakan salah satu **syarat utama bagi penerima vaksin gratis harus memiliki keanggotaan yang masih aktif di BPJS Kesehatan**. ”



“ **Pemerintah berupaya menyediakan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat secara cuma-cuma, tanpa kecuali**. Vaksin ini tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS. **Twitter@Jokowi (18/12) 19.30 WIB.** ”



*Syarat dan Ketentuan Berlaku

CORONAVIRUS
COVID-19
Vaccine

INJECTION ONLY

Fraksi PKS Minta Aparat Profesional dan Proporsional, Jangan Ciderai Rasa Keadilan Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (13/12) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Aparat Kepolisian untuk bertindak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus hukum Habib Rizieq Syihab (HRS).

Jazuli mengatakan harapan serupa diserukan oleh berbagai pihak mulai dari kalangan MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.

"Aparat Kepolisian sedang disorot dalam kasus ini. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Lebih dari itu aparat diminta tidak menciderai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum," ungkap Jazuli.

Terlebih lagi perjalanan kasus ini diwarnai insiden

penguntitan aparat yang berujung meninggalnya 6 orang Laskar FPI pengawal HRS yang menuai kritik dari aktivis dan organisasi pro demokrasi dan hak asasi manusia.

Ditambah lagi delik kasusnya sendiri tentang pelanggaran protokol kesehatan yang masih debatable padahal yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi denda sesuai peraturan. Juga pengenaan delik pidana lain tentang penghasutan mengacu pada Pasal 160 dan 216 KUHP.

Intinya, kata Anggota Komisi I DPR ini, aparat dituntut

untuk dapat menjawab keraguan, kritik, dan pertanyaan publik tersebut. Untuk itu asas profesionalitas dan proporsionalitas harus benar-benar ditunjukkan aparat.

"Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat. Lalu jika dituntut dengan pidana penghasutan bagaimana penjelasannya karena publik juga bertanya-tanya?", jelas Jazuli.

Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi langkah HRS dan FPI yang telah berkomitmen menempuh koridor hukum. HRS dengan kesadaran penuh datang memenuhi panggilan polisi, diikuti tersangka lain.

Sebelumnya, HRS juga telah menyatakan permintaan maafnya secara terbuka akibat kerumunan yang terjadi serta meminta pendukungnya untuk tetap tenang mengikuti proses hukum.

Menurut Jazuli Juwaini, Fraksi PKS terus mengawal kasus ini. Terhadap peristiwa meninggalnya 6 orang Laskar FPI Fraksi PKS meminta klarifikasi Kapolri dan mendorong terbentuknya tim pencari fakta independen termasuk investigasi melalui Komnas HAM yang tengah berjalan.

Sementara terkait penanganan HRS, Fraksi PKS telah menugaskan Anggotanya di Komisi III untuk menjamin

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Aparat Kepolisian sedang disorot dalam kasus ini. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Lebih dari itu aparat diminta tidak menciderai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum

penanggulangan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terakhir, Ketua Fraksi PKS DPR meminta Pemerintah untuk merespon situasi ini secara arif dan bijaksana berdasarkan analisis yang komprehensif. Pemerintah jangan sampai sa-

lah baca, harus cermat, cerdas, dan arif dalam mengatasi masalah sosial masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan baik, berkeadilan, dan bermartabat sehingga tidak berakibat kontraproduktif bagi bangsa dan negara.

Mardani: Saya Kecewa Penangkapan MHRs

KUTIPAN

“Saya menyangkan dan kecewa terhadap proses penetapan HRS oleh Kepolisian. Ini terang benerang rezim Presiden Jokowi sangat tidak Imparsial kepada lawan politiknya dan menjadikan hukum jadi alat penekan

Jakarta (13/12) — Politisi PKS, Mardani Ali Sera kecewa dengan penetapan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Riziq Syihab oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di masa pandemi.

Mardani menganggap seharusnya semua membuat keputusan yang sejuk, saling melindungi dan menyemangati menghadapi Pandemi.

“Saya menyangkan dan kecewa terhadap proses penetapan HRS oleh Kepolisian. Ini terang benerang rezim Presiden Jokowi sangat tidak Imparsial kepada lawan politiknya dan menjadikan hukum jadi alat penekan,” kata Mardani, Minggu (13/12).

Seperti diketahui Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan jeratan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP setelah sebelumnya terjadi pembantaian 6 laskar FPI di KM 50 Cikampek.

Anggota DPR RI Komisi II DPR ini mengatakan penetapan menurut HRS menurut berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum tidak kuat disanggakan pada Habib Rizieq.

“Di masa pandemi, kedewasaan dan kelapangan dada semua pihak mestinya dikedepankan,” katanya.

Menurut Mardani pelanggaran protokol Kesehatan pada Pilkada 2020

berdasarkan data Bawaslu RI tercatat 2.125 pelanggaran selama kampanye.

“Ini semua mau ditanggapi juga atau dibiarkan? Seharusnya, bukan pendekatan kekuasaan apalagi arogansi penetapan hukum semau maunya oleh Pemerintah melalui aparat. Ayo semua kita kawal proses hukum pada siapapun dengan adil, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

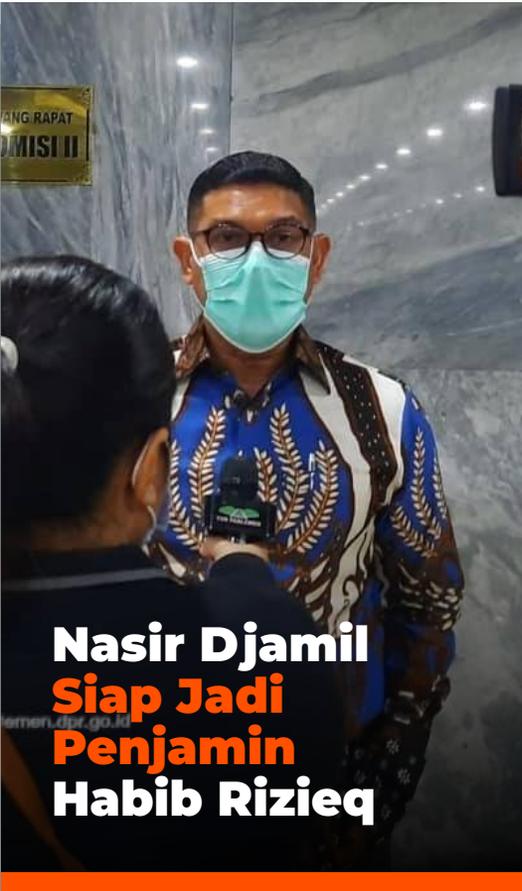
Mardani mengajak seluruh masyarakat dan pendukung HRS untuk terus mengawal penetapan ini dan prosesnya sambil bersabar dan tetap berpegang terguh pada kebenaran.

“Sebagai masyarakat kita harus selalu bekerja dalam koridor hukum. Sing waras tidak. Sesuai janji Allah SWT. Tidak jatuh martabat seseorang karena hinaan dan cacian atau penangkapan. Justru pembela kebenaran akan selalu naik maqom dan martabatnya selama terus menjaga kebersihan hatinya semata karena Allah Swt. Selau doakan untuk orang-orang yang didzalimi, dan mintakan doa dari orang-orang yang terdzalimi, karena doa mereka yg tak ditolak Allah,” pungkasnya.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Fraksi PKS DPR RI

“Ini semua mau ditanggapi juga atau dibiarkan? Seharusnya, bukan pendekatan kekuasaan apalagi arogansi penetapan hukum semau maunya oleh Pemerintah melalui aparat. Ayo semua kita kawal proses hukum pada siapapun dengan adil, transparan dan akuntabel



Nasir Djamil Siap Jadi Penjamin Habib Rizieq

KUTIPAN

Jakarta (14/12) -- Pihak yang bersedia menjadi penjamin penanggungan penahanan untuk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab terus bertambah.

Setelah Sekretaris DPP PKS Aboe Bakar Alhaby dan Waketum Gerindra Habiburokhan, kini politisi PKS dari Aceh. M. Nasir Djamil juga menyatakan kesiapan. Dia bahkan mengaku segera berikirim surat perihal tersebut ke Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran.

Nasir memastikan bahwa dirinya telah melakukan pertimbangan matang atas langkah tersebut. Khususnya pertimbangan masalah hukum dan kemanusiaan.

"Alasan hukumnya, saya yakin Habib tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan kemanusiaannya bahwa HRS memiliki keluarga," ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/12).

Selain dua faktor tersebut, Nasir Djamil juga mempertimbangkan faktor kesehatan serta kondisi sosiologis masyarakat jika Habib Rizieq harus ditahan di Mapolda Metro Jaya.

"Alasan sosiologisnya agar suasana kondusif dapat diwujudkan karena

dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh suasana dan kepentingan di luar hukum agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan penanggungan penahanan yang diberikan

olehnya untuk Habib Rizieq semata-mata untuk memberikan solidaritas antar sesama anggota Dewan yang juga turut memberikan penanggungan penahanan kepada sang Habib.

"Dan juga agar Presiden Jokowi lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi," tandasnya.

Nasir Djamil juga pernah melakukan pemberian jaminan penanggungan saat Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai pimpinan KPK ditahan polisi.

"Alasan sosiologisnya agar suasana kondusif dapat diwujudkan karena dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh suasana dan kepentingan di luar hukum agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga

HM. NASIR DJAMIL, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI

KPK Tangkap Dua Menteri Saat Pandemi

Netty: Keluarga Harus Terdepan dalam Mencegah Perilaku Korup

KUTIPAN

Jakarta (10/12) --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Jakarta (10/12) --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga ditangkap KPK terkait izin ekspor benur lobster.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher merasa prihatin dan menyayangkan peristiwa yang disebutkan sebagai sesuatu yang melukai hati rakyat.

"Bagaimana rakyat tidak marah dan terluka hatinya jika dana bansos untuk jelata pun

dikorupsi juga," katanya dalam keterangan media, Kamis (10/12).

Netty menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan dua menteri tersebut harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi presiden terhadap kinerja kabinet.

"Dalam waktu berdekatan, dua menteri ditangkap KPK. Pemerintah harus mengevaluasi kinerja kabinet, termasuk program revolusi mental yang selama ini diidungungkan. Rakyat membutuhkan role model perilaku anti korupsi dari kalangan pejabat. Bagaimana

rakyat mau percaya bahwa ada perubahan perilaku dalam mengelola negara jika korupsi masih terus merajalela?" tanya Netty retoris.

Politisi dari dapil Kokab Cirebon - Indramayu ini mendorong pemerintah memikirkan formulasi terobosan dalam memberantas korupsi.

"Perlu ada formulasi terobosan untuk hentikan korupsi. Revolusi mental jangan hanya jadi jargon dan proyek, tapi harus benar-benar menjadi game changer yang membuat Indonesia zero korupsi," katanya.

Salah satu terobosan itu kata Netty, jadikan keluarga sebagai institusi pertama yang mencegah perilaku korup.

"Keluarga harus menjadi lingkungan terdepan yang mencegah terjadinya perilaku korupsi, jangan sampai malah mendorong terjadinya tindakan koruptif. Anggota keluarga, terutama suami atau istri pejabat, harus mewaspadai setiap aliran uang yang masuk ke keluarga. Jangan mendiamkan atau malah ikut menikmati uang haram korupsi. Pada akhirnya perilaku korupsi itu akan berdampak pada kekacauan keluarga," tambah Netty.

Terakhir, Netty mengingatkan bahwa sudah seharusnya semua pihak memberi perhatian besar kepada keluarga. Institusi sosial terkait ini, katanya, memiliki peranan penting



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Anggota keluarga, terutama suami atau istri pejabat, harus mewaspadai setiap aliran uang yang masuk ke keluarga. Jangan mendiamkan atau malah ikut menikmati uang haram korupsi. Pada akhirnya perilaku korupsi itu akan berdampak pada kekacauan keluarga.

dalam membentuk dan mengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang.

"Jika keluarga itu baik, maka akan menjadi tempat penyesuaian nilai-nilai kebaikan, melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, peduli, tidak merampas hak orang lain

dan tentu saja anti korupsi. Oleh karena itu, negara harus menjamin dan memberi perlindungan agar semua keluarga di Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dan memiliki ketahanan terhadap kerentanan" tandasnya.



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Presiden Palestina Apresiasi Indonesia
Tolak Normalisasi Israel

HNW Ingatkan Jokowi Konsisten Penuhi Komitmentennya

KUTIPAN

Jakarta (18/12) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas,

dan menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel apa pun perkembangan di Timur Tengah, serta mengingatkan agar Jokowi konsisten memenuhi janji dan komitmen yang disampaikan langsung ke Presiden Palestina tersebut, sebagaimana dikabarkan oleh kantor berita resmi Palestina; Wafa (16/12/2020) dan dikabarkan di Indonesia (18/12/2020).

“Langkah Presiden Jokowi yang berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan secara langsung membantah rumor dan testing water dari media massa Israel bahwa Indonesia

termasuk negara yang akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, patut diapresiasi. Terima kasih Pak Presiden. Sekalipun Presiden juga harus diingatkan untuk melaksanakan komitmen2nya untuk dukung Palestina sbg negara merdeka dan berdaulat” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (18/12).

HNW sapaan akrabnya, menilai langkah Presiden Jokowi ini sudah sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina.

“Ini amanat yang sangat tinggi posisinya karena berada

di dalam pembukaan UUD 1945, dan semua Presiden Indonesia konsisten melaksanakan hal tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan agar Presiden Jokowi juga konsisten terhadap pernyataan langsunnya dengan Presiden Palestina tersebut, dan juga janjinya saat kampanye, debat capres, KTT Luar Biasa OKI dan sambutan saat SU PBB via virtual, bahwa dirinya akan berjuang ikut memerdekakan Palestina.

“Pernyataan dan janji itu harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait Palestina,” tambahnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Presiden Jokowi tidak mendengarkan atau pengaruh bujukan-bujukan, baik dari dalam maupun luar negeri, agar Indonesia ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana yang sudah dilakukan Israel thd beberapa negara di jazirah Arab dan Afrika.



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Karena sikap penolakan normalisasi sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Mahmud Abbas ini, selain sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan dilaksanakan oleh semua Presiden RI, juga didukung oleh mayoritas Rakyat dan anggota parlemen Indonesia.

Dan seharusnya, pihak2 yang tadinya memperkirakan Indonesia bisa diloby untuk normalisasi dengan Israel, agar mengurungkan manuver dan niatnya.

“Karena sikap penolakan normalisasi sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Mahmud

Abbas ini, selain sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan dilaksanakan oleh semua Presiden RI, juga didukung oleh mayoritas Rakyat dan anggota parlemen Indonesia,” tuturnya.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id



Track Record Israel Tidak Bisa Diajak Berteman

32 KUTIPAN

Begitu mereka mendapat hati, langsung brutal. Maka sebetulnya, langkah yang paling baik adalah diisolasi Israel ini. Saya berharap, Pemerintah menjaga amanah konstitusi dengan sebaik-baiknya. Kita berharap betul karena ini persoalan konstitusi. Kalau tujuan normalisasi hanya sekadar investasi, walaupun investasi itu penting, kita berharap hal itu tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar kita sebagai negara merdeka dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa”

H. SUKAMTA, Ph.D.
Anggota Komisi I DPR RI



PKS Faction Chairman: Calling Visa Policy for Israel **Should be Cancelled**

KUTIPAN

Indonesia must not follow the path of Middle Eastern countries that have normalized their relations with Israel. We should be independent to have our own say based on the constitution”

Jakarta (19/12) — Jazuli Juwaini, PKS Faction Chairman in the House of Representative (DPR-RI), urged the Indonesian government to cancel the calling visa policy for Israel since it is not in accord with the constitution and anti-colonialism stance.

“Not only hurting the spirit of the anti-colonialism and the support for Palestinian independence but the plan also in contrary with our constitution,” said Jazuli.

Since the Sukarno era until now, Indonesian foreign policy had always supported the Palestinian independence and fought against Israel’s occupation of Palestine.

“PKS Faction appreciates the government’s effort to back

up the Palestinian and stand against Israel’s occupation. Having said that, we should not have a contradictory policy and weaken our effort by the calling visa plan for Israeli citizens”, stated Jazuli.

Jazuli, who is also the Deputy President of the International Islamic Forum of Parliamentarians, also mentioned that Indonesia’s long experience of being colonized by other country shaped its stance against colonialism, as stated by the 1945 constitution. Based on the same reason, President Sukarno introduced the Asian African Conference and the Non-Aligned Movement.

“That being the case, Indonesia must not follow the path of Middle Eastern

countries that have normalized their relations with Israel. We should be independent to have our own say based on the constitution” said Jazuli.

Additionally, the PKS Faction chairman also reminded that the Palestinian independence is our historical debt since it is the only member of the Asian-African Conference that has not gain its independence to this day.

“Palestine is among the first countries to recognize Indonesian independence so that we have to fight for its freedom from Israel. It is a mandate of the 1945 constitution, which calls for the abolishment of colonialism around the world” ended Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

PKS Faction Chairman in the House of Representative (DPR-RI),

“Palestine is among the first countries to recognize Indonesian independence so that we have to fight for its freedom from Israel. It is a mandate of the 1945 constitution, which calls for the abolishment of colonialism around the world”

Wakil Ketua Fraksi PKS Harap Pemerintah Jangan Terburu-buru Terapkan 5G

KUTIPAN

Jakarta (19/12) — Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan 5G tahun depan. Pemerintah akan mengembangkan teknologi kelima ini. Bahkan Kominfo membentuk gugus tugas untuk mempersiapkannya.

Tiga operator telekomunikasi, yaitu Telkomsel, Tri dan Smartfren pun sudah mendapat lelang frekuensi 5G ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa Pemerintah harus benar-benar siap dalam pengembangan jaringan 5G.

"Kue ekonomi 5G ini sangat besar. Indonesia juga sangat berpotensi bagi pengembangan 5G. Tapi dengan kondisi sekarang, Indonesia bisa-bisa hanya jadi pasar saja. Yang mengambil keuntungan dari kue besar tadi hanya 7 negara : AS, China, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Indonesia hanya mendapat sebagian kecil kue tadi. Jadi,

jangan terburu-buru untuk mengadopsi 5G kalau memang belum siap," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa yang perlu dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu, yaitu infrastruktur dan ekosistem 5G. Tingkat penetrasi internet saja belum merata di seluruh pelosok Indonesia.

Masih ada daerah-daerah yang hanya bisa menangkap sinyal 2G, bahkan masih ada daerah yang tidak ada sinyal sama sekali.

Selain itu juga, lanjut Sukamta, yang perlu dipersiapkan misalnya frekuensi, persiapan regulasi terkait, adjustment terhadap

seluruh regulasi terdampak, dan seterusnya. Jangan sampai karena belum siap, operator telekomunikasi didorong-dorong adopsi 5G, karena misalnya mungkin monetisasinya belum terlalu menguntungkan, ya justru semakin membuat operator rugi, dan industri tertekan. Kita tidak ingin itu terjadi.

"Kita berharap semuanya dipersiapkan, termasuk ekosistem tadi. Percuma kalau infrastruktur dan teknologinya ready, tapi dari sisi penggunaannya belum siap. Musti cermat ini perencanaannya karena biaya untuk 5G tidaklah kecil," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.



Kita berharap semuanya dipersiapkan, termasuk ekosistem tadi. Percuma kalau infrastruktur dan teknologinya ready, tapi dari sisi penggunaannya belum siap. Musti cermat ini perencanaannya karena biaya untuk 5G tidaklah kecil



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Wacana Normalisasi Israel Indonesia

Aleg PKS Ingatkan Pemerintah RI, Israel adalah Penjahah

KUTIPAN

Tasikmalaya (16/12) -- Dalam surat kabar The Times of Israel, Minggu (13/12), seorang sumber diplomat di negara Israel menyatakan mereka kini tengah menajaki peluang normalisasi hubungan dengan Republik Indonesia (RI) dan Oman

Menanggapi hal di atas, Politisi PKS, Toriq Hidayat mengingatkan Pemerintah untuk tidak membuka kerja sama dengan Israel.

Toriq menyebut Israel sebagai penjajah Palestina, cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia wajib melawan segala bentuk penjajahan.

"Jelas dan tegas, pembukaan UUD 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk Palestina. Palestina adalah negara pertama mendukung

kemerdekaan Indonesia. Sudah sepatutnya Indonesia konsisten terus mendukung kemerdekaannya," tegasnya.

Ia menjelaskan, kebijakan RI tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ditunjukkan dengan tidak ada kantor perwakilan atau kedutaan Indonesia di Israel dan sebaliknya.

"Kebijakan ini telah dipertahankan tujuh Presiden Indonesia selama lebih dari tujuh puluh tahun. Bahkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir Indonesia terus berkontribusi dalam upaya mewujudkan Palestina merdeka dan juga

menyalurkan bantuan teknis sebanyak 10 juta dollar kepada Palestina," ungkap Toriq.

Itu sebabnya Anggota Komisi I DPR ini menilai bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia merubah kebijakannya terkait normalisasi dengan Israel.

Kemudian Toriq mengungkap bahwa sebagaimana semua negara dunia, pandemi Covid-19 membuat perekonomian Israel merosot tajam. Amerika sebagai sekutu setianya meyakini normalisasi merupakan solusi perbaikan ekonomi Israel.

"Kondisi penurunan ekonomi meyebabkan Israel berusaha melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara yang tidak membuka hubungan diplomatik dengannya, termasuk Indonesia", ungkapnya.

Salah satu keuntungan normalisasi bagi Israel yakni maskapai penerbangan komersial Israel di perbolehkan melintas di atas negara-negara tersebut. Di Indonesia, karena tidak boleh melintas wilayah RI maka orang nomor satu Israel harus menempuh belasan jam dengan pesawat, menuju Australia dari Singapura.

"Beberapa waktu lalu, Benyamin Netanyahu terpaksa memutar ke Filipina, kemudian ke Papua Nugini baru kemudian mendarat di Australia.

Ketidadaan hubungan diplomatik membuat pesawat milik Israel tidak boleh melintasi wilayah udara RI", ungkap Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI

"Kebijakan ini telah dipertahankan tujuh Presiden Indonesia selama lebih dari tujuh puluh tahun. Bahkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir Indonesia terus berkontribusi dalam upaya mewujudkan Palestina merdeka dan juga menyalurkan bantuan teknis sebanyak 10 juta dollar kepada Palestina

Vaksin Sinovac Tiba

Mardani Ali Sera: Benahi Komunikasi Publik

KUTIPAN

Jakarta (15/12) -- Anggota FPKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Mardani Ali Sera memberikan catatan penting kepada pemerintah berkaitan dengan hadirnya 1.2 Juta Vaksin Sinovac, Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Mardani menyatakan, bahwa kehadiran 1.2 Juta Vaksin Sinovac merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya semakin dekat di penghujung Pandemi Covid-19. Namun masih banyak catatan yang mengiringi hadirnya vaksin tersebut.

"Perlu diingat bahwa vaksin yang datang harus segera diuji klinis, sementara saat ini Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III begitu juga dengan sertifikasi halalnya. Surat izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorization (EUA) wajib dimiliki sebelum vaksin didarakan ke masyarakat," tegas Mardani.

Ia menambahkan, bahwa salah satu catatan besar untuk pemerintah selama

penanganan Covid-19 yakni komunikasi yang tidak baik. Berikan informasi yang jelas, lengkap & valid agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, semakin cepat uji klinis & distribusi, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen (IKK) & Indikator PMI membaik.

"Simpang siur mengenai jual-beli vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh & dirugikan. Satgas Covid-19 perlu mengencangkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi sampai mekanisme pembelian vaksin Covid-19 jalur mandiri," jelas Mardani. Ia berharap, bahwa

pemerintah mau menanggung biaya vaksin melalui mekanisme vaksin program khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 12 Tahun 2017. Mengingat vaksin menjadi kebutuhan publik sebagai upaya mempercepat kekebalan komunitas.

"Vaksin Covid-19 dapat dikategorikan program khusus sesuai dengan pasal 9 PMK yang menyebut, vaksinasi khusus untuk melindungi seseorang & masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi Covid-19 yg menjadi bencana Nasional merupakan kondisi khusus sesuai dgn PMK ini," kata Mardani.

Mardani juga menegaskan, bahwa pemerintah jangan terburu-buru mengimunitasi masyarakat, prinsip kehati-hatian demi keselamatan masyarakat di atas segalanya. Saat ini berikan kesempatan kepada BPOM untuk bekerja agar kita semua tetap aman jika tiba saatnya vaksinasi.



Dr. H. MARDANI, M.Eng.
Anggota Komisi II DPR RI

Simpang siur mengenai jual-beli vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh & dirugikan. Satgas Covid-19 perlu mengencangkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi sampai mekanisme pembelian vaksin Covid-19 jalur mandiri

Anggota FPKS: Komisi II perlu Minta **Klarifikasi** **Ombudsman** terkait Impor Sinovac

Menurut Surahman, Ombudsman memiliki fungsi peJakarta (14/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mendorong Komisi II DPR RI untuk meminta penjelasan Ombudsman untuk mengklarifikasi kebijakan impor vaksin Sinovac.

ngawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan BUMN, BUMD ataupun institusi lain yang menjalankan pelayanan publik.

"Komisi II DPR RI sebaiknya meminta penjelasan Ombudsman untuk mengklarifikasi kebijakan impor vaksin Sinovac," kata Surahman.

Surahman menyampaikan Pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat terkait kebijakan impor vaksin Sinovac.

"Ada aspirasi masyarakat yang mempertanyakan

mengapa pemerintah mengimpor vaksin yang belum memiliki izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari BPOM dan belum diketahui efektivitasnya. Mengapa pemerintah tidak mengimpor vaksin lain yang efektivitasnya sudah teruji secara klinis dan sudah dipakai negara lain. Pertanyaan ini muncul di masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan atas kebijakan ini," tutur Surahman.

Menurut Surahman, dalam rilis resminya Bio Farma menyampaikan uji klinis tahap 3 masih berlangsung dan diperkirakan report interim baru selesai Januari 2021, artinya kita belum tahu bagaimana keamanan dan efektivitas vaksin ini.

"Penolakan IDI untuk mendapatkan vaksin sebelum

mendapatkan izin penggunaan darurat BPOM membuat masyarakat semakin bingung dengan kebijakan pemerintah mengimpor vaksin Sinovac ini. Oleh karenanya Ombudsman penting untuk mengawasi kebijakan impor vaksin Sinovac untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat dan memastikan langkah ini tepat dalam mengatasi pandemi Covid 19 di Indonesia," ujar Surahman.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini berharap Ombudsman menjalankan peran dan fungsi pengawasan pelayanan publik sebagaimana diamatkan Undang-Undang No.37 Tahun 2008. Surahman mengingatkan, jangan sampai import vaksin Sinovac menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Karena sempat beredar surat perintah penyidikan KPK terhadap Menteri BUMN walaupun hal itu sudah ditegaskan sebagai hoaks.

"Vaksin dibutuhkan sebagai upaya penanganan pandemi covid 19 di Indonesia, tapi transparansi terkait hal tersebut menjadi penting karena menyangkut keselamatan banyak orang. Proses pengadaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prosedur kesehatan serta tidak melanggar prosedur dan aturan yang berlaku serta tidak merugikan keuangan negara," pungkas Surahman.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Anggota Komisi II DPR RI

Penolakan IDI untuk mendapatkan vaksin sebelum mendapatkan izin penggunaan darurat BPOM membuat masyarakat semakin bingung dengan kebijakan pemerintah mengimpor vaksin Sinovac ini. Oleh karenanya Ombudsman penting untuk mengawasi kebijakan impor vaksin Sinovac untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat dan memastikan langkah ini tepat dalam mengatasi pandemi Covid 19 di Indonesia



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

Aboe Bakar Alhabsy Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan HRS

"Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP. Dimana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Aboe Bakar Alhabsy Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan HRS

KUTIPAN

Kita hormati proses hukum yang berlaku, karena HRS sendiri bersikap demikian. Hal itu terlihat dengan iktikad baik beliau mendatangi Polda Metro Jaya kemarin.

Jakarta (13/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq Shihab yang Sabtu, (12/12/2020) malam kemarin ditahan Polda Metro Jaya dalam kasus protokol kesehatan.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, pihaknya sebenarnya sangat menyayangkan jika persoalan Protokol Kesehatan berujung pada penahanan.

"Karena kalau kita lihat selama Pilkada kemarin Satgas Covid-19 mencatat adanya 178.039 tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol Kesehatan," terang Habib Aboe.

Namun demikian, lanjut Habib Aboe, kita hormati proses hukum yang berlaku, karena HRS sendiri bersikap demikian. Hal itu terlihat dengan iktikad baik beliau mendatangi Polda Metro Jaya kemarin.

"Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang," ungkapnya.

"Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP. Dimana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS," imbuah Sekjen DPP PKS ini.

Pada umumnya, ungkap Habib Aboe, penangguhan penahanan dapat diberikan dengan tiga syarat, pertama tidak akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan, kedua tidak menghilangkan barang bukti dan ketiga tidak akan melarikan diri.

"Saya melihat tiga syarat itu dapat dipenuhi oleh HRS, sehingga seharusnya penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik. Namun tentunya semua akan Kembali kepada penyidik, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak pengajuan penangguhan penahanan tersebut," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP. Dimana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS,"

Masa Reses, Johan: Pemerintah harus Buat Terobosan agar Pupuk Mudah Didapat dan Harga Terjangkau

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, pada masa reses DPR mengikuti kegiatan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Sumatera Selatan, Selasa, (15/12/2020).

Agenda tersebut dilakukan untuk melakukan Peninjauan PT Pusri, sebagai salah satu BUMN yang berperan sebagai produsen pupuk di Indonesia. Kunjungan tersebut untuk memantau kegiatan produksi pupuk sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas Pertanian di Indonesia.

"Terjadinya kelangkaan pupuk dan banyaknya keluhan petani saat ini, mengharuskan pemerintah untuk segera mencari terobosan agar pupuk mudah didapat dan harga

mudah terjangkau tanpa 'ribet' dengan berbagai aturan," ujar Johan.

Politisi PKS ini menilai agar kebijakan pupuk bersubsidi harus berpihak kepada petani kecil, jangan sampai harga pupuk terasa mahal dan memberatkan petani sehingga mereka tidak bersemangat melakukan kegiatan usaha tani.

"Pupuk bersubsidi sangat langka di berbagai daerah dan kalau pun ada harganya sangat mahal maka pemerintah harus selalu mengontrol rantai distribusi pupuk agar selalu

tersedia sebelum musim tanam tiba," urai Johan mengkritisi kebijakan Pemerintah.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini sangat prihatin dengan banyaknya keluhan petani terkait pupuk bersubsidi ini, maka Johan selalu menegaskan kepada pemerintah untuk bisa menjamin terlaksananya prinsip 6 T kepada petani, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

"Pada masa pandemi ini, saya meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada petani dengan cara mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang signifikan sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas Pertanian kita," tutur Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini berharap adanya transparansi dan aksesibilitas data eRDCK kepada semua stakeholders Pertanian agar verifikasi dan validitas data lebih teruji dan bisa memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada setiap rantai distribusi pupuk bersubsidi.

"Pemerintah harus segera mengatasi pokok persoalan pupuk bersubsidi yang seringkali berulang setiap tahun," tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Pada masa pandemi ini, saya meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada petani dengan cara mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang signifikan sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas Pertanian kita. Pemerintah harus segera mengatasi pokok persoalan pupuk bersubsidi yang seringkali berulang setiap tahun.

Emisi Gas Menurun Akibat Pandemi, **Aleg PKS Minta KLHK Pertahankan Hingga Pandemi Berakhir**

KUTIPAN

Jakarta (15/12) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai Penurunan emisi gas yang terjadi akibat pandemi hanya akan terjadi sementara saja.

Ketika pandemi berakhir, menurut Akmal, lonjakan emisi akan drastis akibat normalnya penggunaan kendaraan bermotor, pesawat dan beroperasinya pabrik-pabrik.

"Penurunan Emisi gas ini sangat baik bagi lingkungan Bumi. Fenomena ini sejalan dengan pesan Kitab Suci, bahwa, Bersama Kesulitan ada Kemudahan. Pandemi yang begitu memukul seluruh aspek kehidupan manusia, secara bersamaan, ada jeda waktu Bumi memulihkan kemampuannya untuk melayani eksistensi kehidupan manusia", tutur Akmal.

Mengutip Proyek Karbon Global (GCP), Akmal sangat terkesan dengan penurunan emisi gas rumah kaca global

tahun ini sebanyak 7 persen, yang merupakan sebuah rekor.

"Ada perbaikan lingkungan skala dunia yang merupakan sinyal dari yang maha kuasa, bahwa kondisi ini perlu dipertahankan dengan inovasi penggunaan energi yang lebih ramah tanpa mengurangi produktivitas," ungkap Akmal.

Penurunan 2,4 miliar metrik ton karbon dioksida (CO2) menurut Anggota Komisi IV dari FPKS ini memang secara produktivitas pergerakan manusia beserta instrumen yang aktif seperti pabrik-pabrik dan mesin-mesin sangat menurun drastis aktivitasnya.

Ibarat manusia sedang berpuasa, lanjutnya, Bumi diberi kesempatan untuk mereset lingkungannya terutama pada

pengaruh emisi karbon yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia.

"Saya berharap, KLHK sebagai lembaga yang menjadi inisiator untuk negara Indonesia, mempertahankan lingkungan yang baik ini dengan menggandeng berbagai lembaga negara agar segera melakukan perubahan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Ini tidak dapat instan, tapi kalau tidak dimulai akan terus menerus Bumi ini kehilangan kemampuannya dalam melindungi seluruh kehidupan makhluk hidup di atasnya", kata Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyoroti, bahwa potensi laut Negara Indonesia masih banyak yang perlu di eksplor termasuk blue energi. Karunia Sumber Daya Alam maritim yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dan belum tergarap optimal.

Garis pantai terpanjang di dunia hingga 108 ribu kilometer akan sangat relevan dalam mencukupi kebutuhan pangan dan energi rakyat Indonesia



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi VII DPR RI

Ada perbaikan lingkungan skala dunia yang merupakan sinyal dari yang maha kuasa, bahwa kondisi ini perlu dipertahankan dengan inovasi penggunaan energi yang lebih ramah tanpa mengurangi produktivitas,

yang juga berpotensi menciptakan iklim lingkungan yang lebih ramah.

"Kedepannya, Digitalisasi sistem kehidupan manusia sudah sangat dekat dan menyeluruh secara global dunia. Teknologi ramah

lingkungan ini mau tidak mau manusia harus masuk eranya untuk mempertahankan bumi sebagai tempat tinggalnya. Saya harap pemerintah Indonesia tidak ketinggalan pada masa peralihan ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Aleg PKS: Jangan Sampai Ada Pemburu Rente Dalam Pengadaan Vaksin COVID-19!

KUTIPAN

Jakarta (13/12) --- Kedatangan vaksin Covid-19, Sinovac, pada Minggu (06/12/20) mendapat sorotan masyarakat Indonesia. Persoalan pengadaan vaksin ini sangat kontroversial karena uji klinisnya belum selesai dan masih belum dapat diketahui efektifitasnya

Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan vaksin yang nantinya akan disuntikan ke masyarakat harus dipastikan benar-benar aman dan halal, serta tidak memberatkan perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

"Saat ini beberapa negara di seluruh dunia sudah ada yang memproduksi vaksin Covid-19. Oleh karenanya Pemerintah harus jeli dan bijak

dalam memutuskan vaksin dari negara mana yang akan dibeli, mengingat setelah vaksin didatangkan dari negara lain harus melalui proses izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," jelas Mahfudz.

Pemerintah, lanjut Mahfudz, diharapkan tidak membeli terlebih dahulu vaksin Covid-19 Sinovac di tahun kedua, sebelum EUA terhadap

vaksin COVID-19 Sinovac sudah diterbitkan oleh BPOM.

Seperti diketahui sudah ada beberapa negara yang mengumumkan mengenai pembuatan vaksin Covid-19 yakni Rusia, China, dan Inggris.

Rusia memproduksi vaksin Covid-19 yang diberi nama Sputnik V, vaksin tersebut telah dilisensikan untuk penggunaan lokal pada Agustus lalu.

China sendiri mengembangkan vaksin Covid-19 yang diberi bernama Sinovac, kabarnya vaksin Sinovac tidak menimbulkan efek samping yang serius dalam kombinasi uji coba fase satu dan fase dua yang diluncurkan pada Mei 2020 yang lalu.

Sementara itu Inggris juga melakukan uji coba vaksin corona yang diberi nama vaksin Oxford, yang saat ini masih dalam pengujian tahap tiga.

Dalam keterangan tertulisnya Mahfudz menyampaikan Pemerintah harus dapat memastikan koordinasi yang baik antar Kementerian teknis dalam penyediaan vaksin Covid-19.

"Mengingat pemilihan dan penentuan jumlah vaksin menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk pembelian atau kerjasama dilakukan oleh Kementerian BUMN", tambah Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (Kota Depok, Kota Bekasi) itu.

"Adanya koordinasi yang baik antar Kementerian teknis diharapkan dapat menghasil-



MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Komisi VI DPR RI

Pemerintah harus hadir dalam mengatur harga vaksin Covid-19 dan tidak menyerahkan kepada mekanisme pasar, agar harga vaksin Covid-19 yang diberlakukan tidak membebani masyarakat

kan keputusan yang tepat dalam penyediaan vaksin COVID-19, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 107 juta masyarakat dengan baik," imbuhnya.

Sepeti diketahui vaksin Covid-19 akan menasar 107 juta orang dengan 75 juta di antaranya adalah vaksin mandiri dan 32 juta ditanggung

pemerintah.

Mahfudz menambahkan, Pemerintah harus dapat mencegah terjadinya praktik pemburu rente dalam penyediaan vaksin Covid-19, mengingat jumlah target pengguna vaksin Covid-19 yang tidak ditanggung Pemerintah sangat besar.

Dukung Digitalisasi BUMN Amin Minta UMKM Dilibatkan

KUTIPAN

Surabaya (18/12) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendukung upaya pemerintah melakukan digitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun Amin meminta proses digitalisasi tersebut melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang teknologi informasi agar restrukturisasi BUMN berimbang positif pada rakyat banyak.

Seperti diketahui, sejumlah BUMN mendigitalkan jasanya atau sistem layanannya. Pertamina misalnya mengalokasikan dana sekitar US \$ 75 juta per tahun untuk proyek teknologi informasi dan digitalisasi.

Salah satu proyek Pertamina tersebut adalah digitalisasi 5.518 pompa SPBU. PT PLN (Persero) meluncurkan 13 terobosan program transformasi berbasis digital mulai dari pembangkit listrik hingga sistem penagihan ke pelanggan.

Perum Pegadaian juga mengalokasikan hingga Rp 500 juta per tahun untuk mendigitalkan layanannya. Melalui aplikasi Pegadaian Digital, Perum Pega-

daian menawarkan fitur gadai online bagi konsumen milenial.

Sejumlah bank BUMN pun mengembangkan berbagai fitur transaksi digital untuk mengedepankan branchless banking di masa mendatang.

Kementerian BUMN memasukkan proyek digitalisasi dalam tiga tahap desain transformasi yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2024.

Transformasi digital BUMN juga akan berdampak pada sektor bisnis lainnya, mengingat rata-rata BUMN memiliki modal yang sangat besar dan jaringan luas.

"Oleh karena itu saya harapkan proses transformasi dan restrukturisasi BUMN bisa menggandeng pelaku UKM untuk menumbuhkan perekonomian nasional lebih baik," tegas Amin Ak.

Menurut Amin, ada sejumlah skema yang dapat digunakan untuk melibatkan UKM dalam percepatan

digitalisasi BUMN. Pertama, menjadikan BUMN Teknologi Informasi seperti Telkom sebagai perusahaan hub yang nantinya berkoordinasi dengan para pelaku UMKM dalam menggarap digitalisasi BUMN. Kedua, berkolaborasi dengan UMKM yang terbukti handal atau menguasai teknologi informasi untuk membuat layanan baru. Ketiga, berinvestasi pada UMKM digital melalui anak perusahaan BUMN di industri modal ventura atau mendukung ekspansi UMKM.

"Dengan strategi tersebut, maka BUMN akan menjadi semacam talent pool untuk mengatasi kesenjangan teknis dan non teknis di sektor teknologi informasi, sekaligus membesarkan pelaku UMKM. Ini akan menjadi basis ekonomi yang jauh lebih kuat menghadapi krisis di masa depan," beber Amin.

Amin juga mendorong digitalisasi BUMN Pertanian dan Pangan yang saat ini lebih banyak rugi ketimbang untung. Ini ironis ditengah pertumbuhannya para pelaku UMKM, terutama dari kalangan milenial yang membentuk perusahaan start up di sektor pertanian dan pangan.

BUMN Pertanian dan Pangan serta BUMN Perkebunan memang jauh tertinggal dibandingkan BUMN-UMKM lain yang sudah lama mendigitalisasikan sebagian lini bisnisnya. Efisien produksi, pemasaran hasil panen, dan



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

Perusahaan-perusahaan ekspedisi pengiriman menjadi contoh bagus bagaimana mereka melibatkan dan memberdayakan UMKM. Dengan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, perusahaan ekspedisi jauh lebih lincah dibanding PT Pos Indonesia, BUMN yang punya jaringan lebih luas. Tidak ada alasan untuk tidak melibatkan UMKM dalam proses digitalisasi di BUMN

penanganan pascapanen menjadi tiga isu sentral dalam membenahi sektor pertanian dan perkebunan.

Sayangnya BUMN yang bergerak di kedua sektor ini justru bermasalah dalam

efisiensi usahanya. Sehingga, lanjut Amin, restrukturisasi termasuk digitalisasi BUMN tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungan Kerja Ke BP Batam

Aleg PKS Minta Kesejahteraan Masyarakat sekitar Jadi seperti Negara Maju

KUTIPAN

Batam (17/12) -- Legislator PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina ketika mengikuti kunjungan kerja di masa Reses Komisi VI ke Kepulauan Riau,

salah satunya pada mitra komisi yakni BP Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam).

Dalam kunjungan tersebut, Nevi meminta secara khusus kepada BP Batam agar mengusahakan tingkat kesejahteraan masyarakat Batam memiliki kesetaraan dengan negara maju.

Menurut Legislator asal Sumatera Barat II ini, BP Batam perlu meningkatkan konsentrasinya pada Pengelolaan tata ruang penyediaan air bersih kawasan industri, infrastruktur pengembangan lahan pertanian, pengembangan pelabuhan dan hal teknis yang

perlu diperhatikan dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan. Batam harus menjadi etalase Indonesia berbenah diri menyaingi negar tetangga.

"Penduduk Batam kan tidak terlalu banyak, saya berharap aktivitas BP Batam dapat melibatkan masyarakat sekitar sekaligus mengupayakan pengabdian sekitar menjadi memiliki kemampuan seperti negara maju. Misal seperti penduduk Singapura yang sudah relatif maju perekonomiannya dengan tingkat pendapatan perkapita sekitar sebesar 65.233.000 USD", tutur Nevi.

Nevi melihat, biaya hidup

di Batam relatif sangat tinggi. Bagi masyarakat yang tinggal di pulau Batam, wajib membayar beberapa jenis pajak daerah atau pungutan antara lain Uang Wajib Tahunan otorita Batam atau UWTO.

UWTO merupakan uang yang harus dibayarkan pemilik hak pengelola lahan kepada BP Batam (Otorita Batam) dengan jumlah tertentu, tergantung dari lokasi dan luas lahan tersebut. Kewajiban membayar pungutan tersebut termuat dalam Keputusan Kepala BP Batam Nomor 85 tahun 2010 tentang penetapan perpanjangan waktu alokasi lahan dan tarif perpanjangan UWTO.

Selain masalah tingkat kesejahteraan masyarakat Batam terutama penduduk asli, Politisi PKS ini menyoroti bagaimana peran BP Batam dalam mengelola persoalan lingkungan.

BP Batam diberi kewenangan dalam pengelolaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam Pelaksanaan Kewangannya, BP Batam sering menghadapi kendala dengan terbitnya berbagai perijinan dari berbagai Kementerian / Lembaga yang ditujukan kepada swasta dan instansi lainnya untuk melakukan pengelolaan dalam Kawasan Perdagangan Bebas Batam seperti Pengelolaan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan.

"Persoalan lingkungan



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

Penduduk Batam kan tidak terlalu banyak, saya berharap aktivitas BP Batam dapat melibatkan masyarakat sekitar sekaligus mengupayakan penduduk sekitar menjadi memiliki kemampuan seperti negara maju

terutama pada kawasan yang diberikan otorita khusus akan menjadi sorotan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. BP Batam saya harap tidak saja fokus pada penyelesaian persoalan aturan yang saling tabrak dan tidak harmonis akibat peraturan kementerian keuangan yang mengakibatkan

investasi mangkrak. Tapi persoalan lingkungan yang secara jangka panjang mengakibatkan dampak tidak menguntungkan juga harus diperhatikan sehingga aktivitas kawasan Batam menjadi sepanjang masa dapat hidup dan berkembang", tutup Nevi Zuairina.

Anggota Komisi VII FPKS Dorong Pemerintah Lanjutkan Stimulus Listrik

KUTIPAN

Jakarta (21/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah mengkaji ulang rencana penghentian pemberian stimulus tarif listrik kepada masyarakat per-Januari 2021.

Mulyanto menilai stimulus itu masih diperlukan masyarakat untuk mengurangi beban hidup akibat pandemi Covid-19.

"Stimulus ini jangan dihentikan hanya sampai Desember 2020. Namun agar diteruskan sampai minimal akhir tahun 2021. Karena masyarakat masih membutuhkan," kata Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menambahkan sebaiknya Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran negara untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Selama pandemi ini belum selesai, sebaiknya selama itu pula Pemerintah membantu.

"Dibandingkan dengan program bansos, pemberian stimulus tarif listrik ini lebih

tepat sasaran dan mudah dipertanggungjawabkan. Datanya valid, jalur distribusi pemberian stimulus jelas dan relatif aman dari korupsi," imbuh Mulyanto.

Mulyanto menyebutkan selama masa reses dirinya berdialog dengan masyarakat kecil di beberapa tempat. Umumnya masyarakat mengaku terbantu dengan adanya stimulus listrik ini.

Masyarakat, kata Mulyanto, sangat berharap program ini terus dilaksanakan.

"Bahkan mereka minta rumah ibadah, masjid dan mushola serta sarana sosial lainnya dikenakan tarif khusus dan juga mendapat stimulus listrik ini," imbuh politisi senior PKS ini.

Untuk diketahui, selama ini Pemerintah memberikan

bantuan listrik dalam stimulus Covid19 untuk daya 450 VA & 900 VA. Program tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu dan rentan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.

Bagi pelanggan rumah tangga, stimulus tersebut telah diberikan sejak April 2020 serta pelanggan bisnis dan industri kecil sejak Mei 2020.

Dengan program stimulus ini maka pelanggan kategori Rumah Tangga 450 VA mendapat Pembebasan tagihan/Token Gratis sampai dengan Desember 2020

Bagi pelanggan Rumah Tangga 900 VA Bersubsidi akan mendapat diskon 50% tagihan/token listrik sampai dengan Desember 2020

Sementara pelanggan bisnis kecil 450VA mendapat bantuan pembebasan tagihan/gratis sampai dengan Desember 2020. Industri kecil 450 VA mendapat pembebasan tagihan/gratis sampai dengan Desember 2020.

Sedangkan lembaga sosial kecil 450 VA diberi pembebasan tagihan/gratis sampai dengan Desember 2020.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Stimulus itu masih diperlukan masyarakat untuk mengurangi beban hidup akibat pandemi Covid-19. Stimulus ini jangan dihentikan hanya sampai Desember 2020. Namun agar diteruskan sampai minimal akhir tahun 2021. Karena masyarakat masih membutuhkan

Rofik Ingatkan Pemerintah Soal Proyek Gasifikasi Batubara Menjadi DME Berpotensi Merugikan Negara

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Proyek konversi batu bara menjadi produk gas atau gasifikasi batubara atau Dimethyl Ether (DME) memasuki babak baru.

Proyek ini diharapkan dapat mensubstitusi dan sekaligus mengurangi impor LPG.

Emiten pertambangan batu bara, PT Bukit Asam Tbk., telah resmi meneken kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan Air Products and Chemicals Inc untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara pada 10 Desember 2020 lalu.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengingatkan pemerintah agar proyek gasifikasi batubara jangan sampai justru berpotensi merugikan keuangan negara.

Rofik memandang proyek gasifikasi Bukit Asam perlu diperjelas kembali agar tujuan

substitusi DME terhadap LPG dapat terealisasi.

Dia menanyakan, berapa biaya processing fee yang harus dibayar Pertamina? Hal ini karena processing fee dan harga pembelian batubara akan menjadi biaya produksi DME yang akan mensubstitusi LPG. Apakah biaya produksi DME ini bersaing dengan harga impor LPG?

Menurut rofik pengembangan hilirisasi batubara sangat beresiko ke depannya

"Proyek pengembangan hilirisasi batubara jika dilihat dari segi keekonomian dan lingkungan ini sangat beresiko

serta berpotensi menyebabkan infrastructure lock-in." Kata Rofik

Dia mengakui, dilihat dari aspek moneter, pelaksanaan proyek DME akan memberikan dampak positif. Proyek DME secara otomatis akan mengurangi besaran impor LPG yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama penyebab defisit neraca perdagangan migas.

Rofik menambahkan, meskipun proyek DME dinilai memenuhi aspek kelayakan teknis, pemerintah dan pelaksana proyek DME perlu lebih cermat dan hati-hati di dalam menghitung kelayakan ekonominya. Karena sejumlah kajian menyebutkan bahwa nilai keekonomian proyek DME relatif rendah dan tidak cukup ekonomis sebagai pengganti LPG.

"Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terutama untuk menghitung biaya dan manfaat dari proyek DME yang akan dilaksanakan. PT Bukit Asam, PT Pertamina, Air Product, dan Pemerintah Indonesia perlu lebih cermat dan berhati-hati di dalam melaksanakan proyek DME ini," tegas Rofik.

Sementara itu, menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Proyek gasifikasi batubara atau Dimethyl Ether (DME) adalah ide yang buruk. Berdasarkan studi terhadap Proyek gasifikasi batu bara yang dikembangkan



H. ROFIK HANANTO, S.E.

Anggota Komisi VII DPR RI

“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terutama untuk menghitung biaya dan manfaat dari proyek DME yang akan dilaksanakan. PT Bukit Asam, PT Pertamina, Air Product, dan Pemerintah Indonesia perlu lebih cermat dan berhati-hati di dalam melaksanakan proyek DME ini,

oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Sumatera, mereka menemukan proyek itu justru dipikirkan akan menyebabkan kerugian 377 juta dolar AS atau Rp5 triliun/tahun--setelah dikurangi biaya operasi dan perbiayaan.

Kerugian itu melampaui nilai penghematan yang bisa

didapatkan dari mengurangi impor LPG senilai 358 juta dolar AS/tahun.

Dengan demikian, program ini akan menyebabkan kerugian setidaknya 19 juta dolar AS atau Rp266,7 miliar/tahun yang ditanggung baik oleh perusahaan dan negara selaku pemegang saham.



PIP PKS Riyadh

@PKS_Riyadh



“Allah telah menghamparkan Bumi yang Luas ini utk memberikan tempat kpd kita dalam menebarkan Kebaikan, Khidmat, & Keadilan. Salam Ayo Lebih Baik dari Tepi Dunia (Edge of The World/Jabal Fihrayn), Riyadh, Arab Saudi” @PKSejahtera @FPKSDPRRI @syaikhu_ahmad

22 Des 2020.

Soal Kasus Korupsi Bansos

Aleg PKS: KPK

Harus Usut Tuntas!

KUTIPAN

Jakarta (11/12) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta KPK untuk menyelidiki kasus korupsi bantuan sosial sembako yang melibatkan Menteri Sosial secara lebih mendalam

Hal ini disampaikan dalam acara PKS Legislative Corner (PLC) melalui platform virtual Zoom, Jumat siang, (11/12).

"Kami meminta KPK untuk menyelidiki dan mengungkap secara menyeluruh kasus korupsi ini. Usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Karena saya yakin bahwa (korupsi) ini melibatkan pihak yang lebih luas lagi", ujar Bukhori.

Lebih lanjut, ia menjabarkan beberapa masalah yang mendera setiap Kementerian dan Lembaga (K/L), sehingga hal itu berpotensi membuka peluang korupsi.

"Saya melihat ada dua persoalan mendasar di sini. Pertama, dari sisi hulu, problem muncul saat menteri menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK). PPK ini yang nantinya membuat kesepakatan dengan mitra pelaksana program, yang

dalam praktiknya, mereka sering menunjuk rekanan sendiri tanpa adanya proses lelang/tender. Kedua, dari sisi hilir, ada masalah saat pendistribusian bantuan, baik itu karena kesalahan data ataupun bantuan tersebut 'dibancak' oleh mitra pelaksana tadi. Mereka memberi barang yang tidak sesuai dengan yang ada di anggaran, sehingga end user (masyarakat) dirugikan", jelasnya.

Menurut Bukhori, DPR memang memiliki keterbatasan, khususnya untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan bantuan sosial.

"DPR bisa menanyakan saat tahap penganggaran saja, hanya sampai pada satuan satu dan satuan dua. Selanjutnya, satuan tiga, empat, dan lima, kami tidak terlibat. Di sini, menteri memiliki kewenangan

yang luas untuk melakukan eksekusi program melalui PPK. Nah, sayangnya, banyak terjadi kongkalikong dengan mitra yang melaksanakan program di tahap-tahap tersebut. Kami di DPR dapat mengawasi kembali ketika melihat secara langsung proses distribusi ke masyarakat, apakah ada penyimpangan atau tidak. Dan berdasar temuan kami, itu banyak terjadi", terang Bukhori.

Bukhori menambahkan bahwa situasi di lapangan telah mencerminkan adanya korupsi bantuan sosial tersebut.

"Saya mendapat sejumlah laporan dalam penyaluran bantuan di masyarakat. Telah terjadi fenomena kesalahan penerima bantuan, salah sasaran. Orang yang pantas menerima, tidak menerima. Sedangkan orang yang seharusnya tidak menerima, justru mendapat bantuan. Ini berarti perlu perbaikan pendataan. Selain itu, ada pula kasus terkait kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai dengan seharusnya", lanjut Bukhori.

Oleh sebab itu, Bukhori menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghilangkan praktik korupsi yang sudah membudaya ini.

"Saya pikir, kita perlu memperbaiki karakter bangsa ini dengan senantiasa mengutamakan kejujuran dan transparansi. Kedua, saya mengusulkan agar yang terbukti korupsi, khususnya



KH. BUCHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Kami meminta KPK untuk menyelidiki dan mengungkap secara menyeluruh kasus korupsi ini. Usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Karena saya yakin bahwa (korupsi) ini melibatkan pihak yang lebih luas lagi",

terhadap hak fakir miskin, perlu dihukum seberat-beratnya untuk memberi efek jera", pungkas Bukhori.

Sebagai catatan, sebelumnya, Menteri Sosial Juliarri Batubara telah dinyatakan sebagai tersangka

oleh KPK terkait korupsi program bansos sembako Jabodetabek. Adapun, total paket anggaran untuk program paket sembako ini adalah Rp 6,8 triliun dan dicanangkan sebanyak 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ribuan Santri Terpapar Covid-19 dan Ratusan Kyai Wafat

HNW Desak Kemenag Lebih Serius Bantu Pesantren

KUTIPAN

Jakarta, (14/12) Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyoroti tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Pondok Pesantren.

Jakarta, (14/12) Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyoroti tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Pondok Pesantren.

Berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren Kementerian Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat 4328 Santri, 21 Ustadz/Ustadzah, dan 2 Pegawai Nopnes, di 67 Pesantren, di 13 Provinsi, Positif Covid-19.

Data Ketua Umum RMI (Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah) PBNU, KH Abdul Ghafar Razin, yang disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PBNU, juga

menemukan adanya 110 Pesantren dan 4000-an Santri yang terpapar covid-19, dan 207 Kyai/Nyai wafat yang diduga kuat karena covid-19.

Sementara itu, data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan setidaknya 3000 santri dinyatakan positif Covid-19 dalam 3 bulan terakhir, dimana bahkan wilayah seperti Cilacap 55% kasus Covid-19 pada bulan Oktober disumbangkan oleh klaster Pondok Pesantren.

HNW yang juga Wakil Ketua MPR ini meminta Kemenag untuk lebih serius mengadvokasi Pesantren dan bekerjasama dengan Instansi terkait untuk mengatasi

tingginya penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai, dengan edukasi, pendampingan, bantuan langsung untuk pengadaan lingkungan yang sehat & bersih, sarana cuci tangan/ sanitizer, dan dengan menyediakan fasilitas Swab PCR gratis bagi Pesantren yang mengadakan pembelajaran tatap muka.

Kemenag juga, lanjut HNW, harus menghubungkan program tersebut dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan Pesantren.

"Pesantren sebagai aset pendidikan moral dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi rawan akibat Covid-19. Banyak Santri/ Ustadz/ Kiyai yang terpapar. Sudah seharusnya Kementerian Agama lebih memastikan kehadiran dan advokasinya untuk dunia Pesantren", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (14/12).

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Agama membantu Pesantren dalam mengatasi covid-19 melalui maksimalisasi potensi anggaran tahunan yang tidak terserap, yang setiap tahunnya berada di atas Rp 2 Triliun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Pesantren sebagai aset pendidikan moral dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi rawan akibat Covid-19. Banyak Santri/ Ustadz/ Kiyai yang terpapar. Sudah seharusnya Kementerian Agama lebih memastikan kehadiran dan advokasinya untuk dunia Pesantren",

Dukung Program Kemensos

Nur Azizah **Resmikan** Lapangan Keserasian Sosial di Kota Bekasi

KUTIPAN

Bekasi (17/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, meresmikan Lapangan Keserasian Sosial di RW 010 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi pada Sabtu (12/12/2020).

Berdasarkan Aspirasi yang telah diserap, Nur Azizah mendorong Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang merupakan mitra Komisi VIII DPR RI, melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), agar menyalurkan bantuan Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal untuk warga Kota Bekasi yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Nur Azizah.

Kegiatan peresmian diawali dengan Sarasehan oleh Forum SATARA sebagai pengelola bantuan keserasian Sosial Kemensos RI.

Program Bantuan Keserasian Sosial ini merupakan Program dari Kementerian Sosial bertujuan untuk menciptakan

kondisi damai di masyarakat sebagai upaya pencegahan bencana sosial seperti konflik dan teror yang terjadi di masyarakat.

Bantuan Keserasian Sosial yang telah disalurkan kepada warga RW 010 Jakamulya Kota Bekasi ini dialokasikan warga untuk pembangunan lapangan keserasian sosial, yang terdiri dari Bale RW 010, Taman Bermain Anak-anak, Taman Tanaman Obat Keluarga (Toga), Posyandu, dan beberapa fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan warga.

Dalam peresmian ini turut dihadiri Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Andhika Dirgantara, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Ahmad Yani,

Sekretaris Dinas BMSDA Kota Bekasi, Asep Kadarisman, Lurah Jakamulya yg diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Jakamulya Arja Wijaya, Ketua RW 10 Graha Indah, Nanang Wahyudi, Sekretaris RW 010 Eko Susanto, Ketua-Ketua RT, Kader PKK, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat.

Nur Azizah berharap dengan adanya lapangan keserasian sosial ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan bersilaturahmi antar warga.

“Mudah-mudahan dengan adanya lapangan keserasian sosial ini menjadi contoh yang baik untuk wilayah lainnya serta semua program-program yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan baik” tutur Nur Azizah.

Tidak lupa Nur Azizah terus mengingatkan warga masyarakat untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan dalam bersosialisasi di masa Pandemi Covid-19 ini.

Pada kesempatan ini, Andhika Dirgantara selaku DPRD Kota Bekasi turut berterimakasih kepada Nur Azizah.

Berkat dorongannya, kini



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Mudah-mudahan dengan adanya lapangan keserasian sosial ini menjadi contoh yang baik untuk wilayah lainnya serta semua program-program yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan baik”

warga RW 010 dapat meresmikan lapangan keserasian sosial ini. Andhika berpesan agar warga dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk bersosialisasi yang sehat.

“Terimakasih kepada ibu Nur Azizah yang sudah dapat membantu program ini ke

Bekasi, semoga kedepannya akan banyak program-program lainnya yang bisa dibawa ke Bekasi. Hari ini kita bisa meresmikan taman keserasian sosial, paling penting di taman ini kita bisa berkumpul.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Banyaknya Santri dan Kyai
Ponpes Terpapar Covid 19,

Iskan: Kemenag Belum Maksimal

KUTIPAN

Jakarta (17/12) — Berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren Kementerian Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat 4328 Santri, 21 ustadz dan ustadzah, serta 2 Pegawai Ponpes, di 67 Pesantren, di 13 Provinsi, Positif Covid-19.

Sementara itu, Data Ketua Umum RMI (Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah) PBNU, KH Abdul Ghafar Razin, yang disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PBNU, juga menemukan adanya 110 Pesantren dan 4.000-an Santri yang terpapar covid-19, dan 207 Kiai/Nyai wafat yang diduga kuat karena covid-19.

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengungkapkan keprihatinannya akan kondisi tersebut.

"Saya menyayangkan bahwa negara ini belum hadir secara maksimal saat musibah pandemi Covid 19 melanda

pondok pesantren di berbagai daerah," ungkapnya.

Iskan mengungkapkan bahwa Kemenag masih minim memberikan sosialisasi dan edukasi Covid 19 di pesantren, apalagi saat ini banyak juga pesantren di beberapa wilayah sudah melakukan Pembelajaran tatap muka.

"Seluruh elemen yang terlibat dalam proses belajar mengajar di pesantren harus mendapatkan wawasan tentang penanganan Covid 19, baik itu terkait pencegahannya bahkan Pesantren harus bisa menjadi teladan bagi entitas lainnya dalam memutus mata rantai Covid 19 ini. Contohnya memakai masker, mencuci

tangan dan menjaga jarak serta membatasi jumlah siswa yang hadir tatap muka dari jumlah standard yang sudah ditentukan" ungkap Iskan.

Maka dari itu, Iskan menilai perlu kiranya Kemenag meningkatkan komunikasi publik bagi klaster Covid 19 di Pesantren saat ini, dan akses bantuan selama covid 19 tidak boleh terkendala sedikitpun.

"Kaji Ulang kembali bantuan-bantuan yang sudah tersalurkan seperti BOP, bantuan alkes seperti masker, Hand sanitizer, dan lain sebagainya. Apakah sudah maksimal atau belum. Juga saya menghimbau Kemenag bisa mempermudah akses mudah SWAB PCR Gratis bagi pesantren yang terpapar Covid 19, agar tracing yang dilakukan bisa tepat sasaran," terang Iskan.

Politisi PKS Asal Sibuhuan ini mengingatkan bahwa Pesantren merupakan aset penting bangsa Indonesia, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus hadir secara lebih serius dengan pola penanganan terpadu agar dapat memutus Rantai Covid 19 dan kluster Pesantren bisa bebas dari Covid 19.

"Kemenag bisa menggandeng Kementerian Kesehatan (kemenkes) dalam mencegah penularan Covid-19 di pesantren. Terutama saat ditemukan kluster penularan Covid-19 di kalangan santri dan para Kyai. Juga bisa memanfaatkan alokasi

**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

"Seluruh elemen yang terlibat dalam proses belajar mengajar di pesantren harus mendapatkan wawasan tentang penanganan Covid 19, baik itu terkait pencegahannya bahkan Pesantren harus bisa menjadi teladan bagi entitas lainnya dalam memutus mata rantai Covid 19 ini.

anggaran dari potensi anggaran yang tidak terserap pada akhir masa anggaran, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh UU. Pesantren ini aset bangsa yang luar biasa tinggi nilainya, maka penting bagi kita semua untuk memperhatikan. Walaupun ditengah pandemi seperti ini,

Kita harus memastikan Santri dan Kyai harus sehat dan Kuat agar output dari pesantren ini tetap akan melahirkan insan-insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara serta menghadirkan Ulama-ulama yang rahmatan lil alamin di masa mendatang," pungkas Iskan mengakhiri.



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***



Legislator PKS: Rakyat Berhak Dapatkan Vaksin Covid-19 **Gratis**

KUTIPAN

Jakarta (16/12) -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memberikan catatan soal simpang siur pengadaan vaksin Sinovac dari Tiongkok dan rencana vaksinasi Covid-19.

Mufida meminta agar vaksinasi diberikan gratis kepada masyarakat. Ia menyebut dengan pencadangan dana sebesar Rp 35,1 triliun cukup untuk proses pengadaan 172 juta vaksin untuk terpenuhinya syarat kekebalan kelompok.

"Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp 50,95 M. Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini harusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Mufida menekankan, jangan sampai insentif bea masuk untuk vaksin dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Ia melihat rencana 70 persen vaksin mandiri berbayar yang dikelola BUMN kurang tepat.

Ketua BPKK DPP PKS ini menyebut dalam pengadaan

memang ditunjuk PT Biofarma sebagai BUMN yang fokus dalam produksi vaksin. Sementara sesuai Perpres No 99 Tahun 2020, proses vaksinasi diamanahkan oleh Kemenkes. Oleh Menkes, lewat Keputusan Menteri Kesehatan No 9860 Tahun 2020, 70 persen vaksinasi justru diberikan pelaksanaannya kepada Kementerian BUMN.

"Disini harus hati-hati sebab vaksinasi kepada

masyarakat ini adalah salah satu kebijakan dalam masa bencana nasional nonalam. Dalam hal penanggulangan bencana, justru rakyat berhak mendapatkan bantuan, bukan beban biaya," papar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Mufida juga meminta efektivitas anggaran pengadaan vaksin dengan memperhatikan efikasi vaksin yang belum terbukti lolos uji klinis tahap III dan belum memenuhi syarat EUA.

"Kedatangan 1,2 juta vaksin sinovac kemarin, negara sudah mengeluarkan pembayarannya uang muka padahal belum keluar hasil uji klinis tahap III. Kami harapkan sisanya jangan didatangkan dulu sampai keluar hasil uji klinis dan izin edar dari BPOM," ujar Mufida.

Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp 50,95 M. Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini harusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan,

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Indonesia Juara ke-4 Stunting Dunia

Netty: Negara Harus Hadir Lindungi Ketahanan Keluarga

KUTIPAN

Cirebon (20/12) — Indonesia urutan ke-4 dunia dan juara kedua Asia Tenggara dalam hal balita stunting.

Netty Prasetyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI, meminta pemerintah agar melakukan evaluasi pembangunan keluarga sebagai hulu persoalan.

"Angka prevalensi stunting di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan WHO. Butuh kerja keras dan serius untukurunkannya. Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana. Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Tokoh Penggerak Pembangunan Keluarga kota Cirebon dan Indramayu di Kuningan, Sabtu, 19/12.

Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3

juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya dibawah 20 persen.

Oleh karena itu, Netty meminta Pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN untuk menjadi leading sector pengentasan stunting.

"BKKBN harus diberi wewenang yang lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang mampu atasi dan cegah stunting sejak dini. Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal, termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga memiliki ketahanan dalam

menghadapi kerentanan. Ketahanan keluarga menjadi faktor utama terwujudnya ketahanan nasional," jelasnya.

Kegiatan ini bertujuan membangun komitmen bersama mengatasi dan mencegah stunting ini diikuti 50 orang perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dari Kokab Cirebon dan Indramayu.

Kusmana, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat berpesan agar tokoh masyarakat menjadi pelopor gerakan pembangunan keluarga agar terbangun generasi dan keluarga yang berkualitas.

"Saya mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar membantu pemerintah menyosialisasikan perencanaan dalam keluarga. Hindari pantangan empat terlaru untuk mencegah resiko kehamilan yaitu, terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat atau terlalu sering," ujarnya.

Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustari juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengingatkan tentang



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

“Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal, termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan.”

pentingnya masa emas 1000 hari pertama kehidupan.

"Kita harus memastikan bahwa dalam 1000 hari pertama kelahiran, bayi mendapatkan asupan gizi, perawatan dan kasih sayang yang memadai sehingga tumbuh kembang dengan baik

dan terhindar dari stunting," ungkapnya.

Kegiatan ini diisi dengan kegiatan outdoor dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut pengawasan ketahanan keluarga, terutama permasalahan pembangunan keluarga dan stunting.

Komisi X DPR Dalami Karakter Wisata Berbasis Budaya di Gunung Kidul

KUTIPAN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Kunjungan Kerja Reses Komsii X DPR RI ke Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam kunker ini, Komisi X DPR RI melakukan pendalaman pada persoalan kebudayaan. Faqih pun mempertanyakan dampak pandemi Covid-19 pada kemajuan kebudayaan di Gunung Kidul.

“Permasalahan apa saja yang sering muncul terkait kemajuan kebudayaan? Bagaimana dampak pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap kebudayaan di Gunungkidul. Apa kendala dan permasalahan?” tanya Faqih saat memimpin rapat Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di Pendopo Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Selasa (14/12/2020).

Selain itu, lanjut Fikri,

kunker ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dan new normal di Gunung Kidul.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menambahkan, dalam kunker ini juga guna mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.

Sementara itu di sisi lain,

Bupati Gunung Kidul Badingah menjelaskan, terkait dengan kemajuan kebudayaan di daerahnya, seperti kesenian khas Gunung Kidul seperti seni tari jelantur dan tayub serta seni musik rinding gumbang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait.

Selain itu para pelaku seni dan budaya belum memanfaatkan sejarah lokal Gunung Kidul untuk memperkuat karakter wisata berbasis budaya. Tak tanya seni dan budaya, pemberdayaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal dan meningkatkan mutu kerajinan lokal Gunung Kidul untuk mendukung pariwisata, belum mendapat perhatian sepenuhnya.

Badingah pun mengungkapkan, implikasi pandemi Covid-19 terhadap kebudayaan di Gunung Kidul cukup terasa, terutama pada aspek pementasan seni. Dinas Kebudayaan sempat menghentikan sejumlah pementasan, namun setelah Pemkab memperbolehkan kegiatan kembali berjalan, Dinas Kebudayaan kembali menggelar kegiatan pentas seni berbasis daring dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. (eko/alw/sf)



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Kunker ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dan new normal di Gunung Kidul.

Nasabah Jiwasraya
Tuntut Keadilan

Anis Sampaikan Catatan Penting untuk Kasus Jiwasraya

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Para nasabah pemegang polis asuransi Jiwasraya saving plan yang tergabung dalam Forum Korban BUMN Jiwasraya menyampaikan tanggapan atas skema restrukturisasi yang di rumuskan oleh PT Asuransi Jiwasraya, pada Senin, (14/12/2020).

Dalam kesempatan tersebut perwakilan pemegang polis mengatakan bahwa skema restrukturisasi tidak pernah dibicarakan dan disosialisasikan kepada para pemegang polis.

Mereka juga menegakkan bahwa kasus gagal bayar ini murni kesalahan tata kelola. Berdasarkan pernyataan dari forum korban Jiwasraya itu, tergambar mereka meminta keadilan, ketegasan, serta pertanggungjawaban dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK selaku regulator.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatannya di Jakarta (16/12/2020).

Pertama, Anis menyampaikan bahwa kasus gagal bayar Jiwasraya memang salah satunya karena ada kesalahan tata kelola perusahaan.

Ada juga unsur lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham negara.

"Karena itu, PKS mendesak DPR RI utk mengusut tuntas Kasus Jiwasraya melalui pembentukan Panitia Khusus (PANSUS). Karena ada indikasi fraud yang berlangsung lama. Juga terkait dengan kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham negara," ungkap Anis.

"Namun kita tahu, dalam perkembangannya tidak ada pembentukan Pansus untuk Kasus Jiwasraya," tambahnya.

Catatan kedua, kasus jiwasraya menjadi pelajaran dan cambuk yang luar biasa bagi para nasabahnya. Sudah sering kita sesalkan minimnya edukasi kepada nasabah tentang macam-macam program asuransi, selain nasabah juga 'enggan' bertanya bagaimana skema asuransi yang mereka ikuti.

"Yang nasabah tahu bahwa di awal mereka merasa diberikan 'iming-iming' yang menguntungkan di masa yang akan datang apabila mengikuti asuransi tersebut. Apalagi perusahaan asuransi ini adalah milik negara yang seharusnya paling terpercaya," ujar Anis.

Dalam catatan ketiganya, legislator PKS dari Jakarta Timur ini menyampaikan bahwa terkait produk saving plan, seharusnya otoritas dalam hal ini OJK sudah mengetahui kondisi keuangan Jiwasraya yang tidak



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

PKS mendesak DPR RI utk mengusut tuntas Kasus Jiwasraya melalui pembentukan Panitia Khusus (PANSUS). Karena ada indikasi fraud yang berlangsung lama. Juga terkait dengan kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham negara

sehat pada saat mengeluarkan produk Saving Plan.

Namun, regulator masih tetap memberikan izin produk tersebut untuk dilaksanankan. Selain itu, seharusnya Perusahaan asuransi (Jiwasraya) sudah menjelaskan skema asuransi 'saving plan' ini di awal sehingga nasabah benar-benar paham atas pilihannya.

Catatan keempat, lanjutnya, jangan sampai penyelesaian kasus Jiwasraya merugikan nasabah. Tentu saja nasabah harus diberikan informasi secara komprehensif dan dilibatkan secara aktif dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya terkait kasus yang dialami oleh Jiwasraya. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Aleg PKS Junaidi Auly Harap Merger Bank Syariah **Mampu Jawab** Peluang dan Tantangan

KUTIPAN

Jakarta (19/12) — Pemerintah telah resmi mengumumkan nama penggabungan bank BUMN Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Kehadirannya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mampu menjawab persoalan dan berbagai tantangan bank syariah selama ini.

"Bank Syariah Indonesia harus meningkatkan keunggulan kompetitif, harus ada peningkatan di semua sektor baik pelayanan, segmen pasar, pembiayaan UMKM, dan digitalisasi pelayanan perbankan," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya. Sabtu, (19/12)

Berbicara soal tantangan, Legislator Fraksi PKS ini menambahkan Bank Syariah

Indonesia harus lebih berani dalam inovasi produk dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan jati diri yang dimiliki dan tetap sesuai prinsip syariah.

Dengan berinovasi terhadap produknya diharapkan dapat menarik minat nasabah dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia harus terus mengencarkan upaya meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat.

Data OJK mencatat inklusi keuangan syariah 11,1 persen pada 2018 dan mengalami penurunan menjadi 9,10 persen di 2019 dan indeks literasi keuangan syariah tercatat 8,1 persen di 2018 meningkat menjadi 8,93 persen pada

2019. Bandingkan literasi keuangan konvensional mampu meningkat lebih signifikan dari 29,5 persen pada 2018 menjadi 37,72 persen pada 2019.

"Literasi keuangan syariah merupakan tantangan terbesar yang harus diperhatikan bersama, perlu ada terobosan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah dengan sosialisasi dan edukasi ke berbagai kelompok masyarakat," kata Junaidi.

Lebih lanjut, Legislator asal Lampung ini menegaskan potensi perbankan syariah kedepan masih sangat besar dan menjanjikan, namun tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar.

Momentum merger tiga bank BUMN Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu mendorong tujuan ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.



Ir. H. A. JUNAIIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

Literasi keuangan syariah merupakan tantangan terbesar yang harus diperhatikan bersama, perlu ada terobosan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah dengan sosialisasi dan edukasi ke berbagai kelompok masyarakat

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Jazuli Juwaini Kembali Bagikan Sembako dan Masker Bagi Warga Pabuaran

KUTIPAN

Pabuaran, satubanten.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini kembali melanjutkan komitmennya membantu masyarakat di saat pandemi melalui donasi paket sembako dan masker.

Sebanyak 200 paket dibagikan seminggu terakhir kepada kelompok masyarakat yang terdampak signifikan oleh Covid-19 di Pabuaran Kabupaten Serang dan Cipocok Kota Serang.

Paket sembako ini didistribusikan secara bertahap, Sabtu lalu di Cipocok dan hari ini, Rabu (16/12/2020) di Pabuaran Kabupaten Serang.

Menurut Jazuli, pembagian sembako ini merupakan komitmen PKS dalam memberikan perhatian pada masyarakat.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami di PKS

dalam melayani masyarakat saat pandemi. Oleh karena itu, pemberian sembako adalah bentuk cinta kami pada warga,” ujar Jazuli, Rabu (16/12/2020).

Lebih lanjut Jazuli mengatakan bahwa perhatian bagi masyarakat saat ini harus terus didampingi.

“PKS berupaya terus berkontribusi mendampingi masyarakat dalam segala kondisi. Sejak Covid melanda, PKS selalu hadir disetiap saat,” ujar Jazuli.

Program pembagian sembako dilakukan oleh dirinya secara rutin yang dibagikan merata melalui struktur dan simpul massa.



Melalui program ini, Jazuli berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan sosial selama masa adaptasi kebiasaan baru ini.

Beragam bantuan ini diberikan ke berbagai elemen masyarakat seperti warga umum, pondok pesantren, majlis taklim dan organisasi massa lainnya.

Paket sembako juga konsisten diberikan kepada masyarakat di Cilegon, Kab/Kota Serang yang merupakan daerah pemilihan Jazuli meliputi Dapil Banten II. (Sinta/SBS)

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami di PKS dalam melayani masyarakat saat pandemi. Oleh karena itu, pemberian sembako adalah bentuk cinta kami pada warga. PKS berupaya terus berkontribusi mendampingi masyarakat dalam segala kondisi. Sejak Covid melanda, PKS selalu hadir disetiap saat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

Salurkan Hak Pilih,

Nur Azizah Tamhid Mencoblos di TPS 177 Depok

 KUTIPAN

Depok - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A salurkan Hak Pilih dalam Kontestasi Pilkada Depok pada Rabu (9/10) di TPS 177, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Nur Azizah hadir di TPS beserta sang suami, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. yang merupakan Wakil kota Depok periode 2006-2016.

Bersama Nur Mahmudi, Nur Azizah turut mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Depok agar jangan sampai ketinggalan memeriahkan kontestasi politik ini dengan menyalurkan hak pilihnya. "Mari kita gunakan hak pilih kita pada pilkada kali ini, jangan ada yang golput, karena pilkada cuma sekali dalam 5 tahun, jangan sampai menyesal tidak mencoblos, karena ini menentukan kemajuan Depok 5 tahun kedepan", ajak Nur Azizah.

Sebagai seorang politisi dari partai yang sudah tiga

periode memimpin Depok, Nur Azizah berharap PKS akan kembali melanjutkan estafet kepemimpinan dalam periode ke empat di Kota Depok. "PKS sudah terbukti dapat membangun Depok, Insya Allah, jika kembali diamanahkan untuk memimpin Depok, kader-kader PKS dapat terus memajukan dan membawa perubahan untuk Kota Depok yang lebih baik", jelas Nur Azizah.

Nur Azizah berharap kota Depok dapat terus di pimpin oleh orang-orang yang soleh dan mampu memimpin dengan adil, serta terhindar dari perilaku dzalim. Mengenai kepemimpinan yang adil, Nur Azizah menyebutkan itu sudah diatur secara detail dalam

Islam, ia menyampaikan kutipan Hadits:

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, 'Ada tujuh kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisri hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah di mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, 'Aku takut kepada Allah,' seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata,'" (HR Bukhari dan Muslim).

"Sudah jelas disana disebutkan mengenai pemimpin yang adil. Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil ini bukan tanpa makna. Tapi menunjukkan betapa pentingnya keadilan imam atau pemimpin di tengah masyarakat", tegas Nur Azizah.

Sementara itu, Nur Mahmudi yang pernah memimpin Kota Depok selama 10 tahun juga berharap agar Kota Depok menjadi lebih baik, "Pemkot Depok bersama warganya harus berjuang keras mewujudkan Visi RPJP KOTA DEPOK 2016-2025, yaitu Depok



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Insya Allah PKS terus berkomitmen mengusung kader-kader terbaiknya yang soleh, adil dan amanah, tidak hanya di Kota Depok saja, tapi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. kader PKS akan terus berkprah menjadi sosok negarawan yang soleh yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan", berdasarkan kepada Visi di atas, tanpa mengabaikan peningkatan kualitas dan produktivitas aneka barang oleh ratusan Pabrik di berbagai kawasan Industri yang ada, Depok harus berjuang meningkatkan kesejahteraan perekonomian

warganya melalui sektor niaga dan jasa yang berpegang teguh pada nilai dan norma agama serta kelestarian lingkungan. Seluruh aktivitas industri barang, perdagangan dan jasa di Depok harus berpegang teguh kepada nilai kelestarian lingkungan, Selengkapnya di fraksi.pks.id

Rofik Bagikan Bingkisan Kepada Peserta Khitan Massal

Purbalingga (19/12) — Sebanyak 17 anak peserta Khitan Massal mendapat bingkisan dari Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto. Khitan massal bertajuk khitan ceria diadakan di Sekolah Alam Perwira Purbalingga di Desa Gambar Sari, Kecamatan Kemangkon, Sabtu (19/12). Rofik menyerahkan bingkisan didampingi istri Fidlou Threeyati. Anak-anak yang menerima bingkisan terlihat senang. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI dari Dapil Jateng VII itu.

Kepada anak-anak yang khitan, anggota Komisi VII DPR RI itu meminta mereka agar ibadahnya tambah bagus, shalatnya tambah rajin, setiap hari tadarus Alquran, serta dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan Alquran.

"Hari ini kita berbagi kebahagiaan di Sekolah Alam Perwira, sekolah yang menarik, kreatif dan inovatif. Khitan ini adalah salah satu kewajiban bagi anak laki-laki yang

dicontohkan Nabi Ibrahim," ujar pria murah senyum kelahiran Purbalingga itu.

Menurut Rofik, dengan melaksanakan kewajiban ini semoga Allah semakin cinta kepada kita.

"Dengan dikhitan, Anak-anak menjadi terjaga kesuciannya. Semoga setelah dikhitan anak-anak menjadi semakin sholeh yang berbakti kepada agama, keluarga, bangsa dan negara. Khitan ini juga bentuk ujian keberanian anak laki-laki," tuturnya.

Ketua Panitia Khitan Ceria, Dwi Gandik Biworo menyampaikan terima kasih atas bingkisan yang diberikan Rofik.

"Kegiatan ini bertujuan mengantarkan anak untuk persiapan kesempurnaan akal balig. Kami juga ingin menyenangkan anak saat khitan. Karena suasana tentu akan beda ketika anak khitan sendiri dan bersama temannya. Selain itu anak juga diberi hadiah," kata Gandik.



H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Dengan dikhitan, Anak-anak menjadi terjaga kesuciannya. Semoga setelah dikhitan anak-anak menjadi semakin sholeh yang berbakti kepada agama, keluarga, bangsa dan negara. Khitan ini juga bentuk ujian keberanian anak laki-laki



Aleg PKS Serahkan SK Beasiswa PIP dan Tinjau SD di Gunung Biru Tamanjeka Kabupaten Poso

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi X Sakinah Aljufri menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), sekaligus meninjau SD Negeri 2 Tokorondo Desa Weralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso beberapa waktu silam.

Sebanyak 52 siswa/siswi yang berada di daerah pedalaman Poso Sulawesi Tengah merupakan anak-anak yang sangat membutuhkan beasiswa untuk dapat melanjutkan sekolah.

"Program beasiswa PIP yang kami salurkan bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan juga membantu siswa dan siswi yang berasal dari keluarga pra sejahtera terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini,"

ungkap Sakinah.

Dalam sambutannya Sakinah menyampaikan bahwa Program beasiswa PIP dirancang khusus untuk membantu anak-anak didik usia sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

"Beasiswa PIP ini secara khusus dirancang untuk anak-anak usia sekolah dari SD, SMP, SMA dan SMK agar mendapatkan layanan pendidikan yang baik," tegas Sakinah.

Disela-sela kegiatan, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pun mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab Anggota DPR untuk memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya.

"Meskipun tempat ini jauh dari kota, terletak di kaki gunung. Akses ke sini pun luar biasa, tetapi disini ada anak-anak kita yang berhak mendapatkan beasiswa PIP. Apapun kendala medannya, kami tetap datang agar anak-anak didik kita setidaknya mencicipi anggaran pemerintah dan mampu mengurangi beban mereka," ungkapnya.

Dalam kegiatan penyerahan SK beasiswa dan peninjauan sekolah kali ini, Sakinah didampingi oleh Seketaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Kepala Desa Kasiguncu, Danramil Kabupaten Poso Pesisir Bersaudara serta Kapolsek Poso Pesisir.

Tercatat sampai saat ini baru dua Anggota DPR RI yang menembus pedalaman Gunung Biru yang terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso, salah satunya adalah Sakinah Aljufri untuk menyalurkan beasiswa PIP.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

"Meskipun tempat ini jauh dari kota, terletak di kaki gunung. Akses ke sini pun luar biasa, tetapi disini ada anak-anak kita yang berhak mendapatkan beasiswa PIP. Apapun kendala medannya, kami tetap datang agar anak-anak didik kita setidaknya mencicipi anggaran pemerintah dan mampu mengurangi beban mereka

Nevi Zuairina Serahkan Bantuan Dana Renovasi Surau dan Peningkatan Alat untuk Lembaga Pendidikan

KUTIPAN

Padang Pariaman (19/12) -- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menyerahkan Bantuan secara simbolis dana pembangunan Renovasi dan dana pengadaan alat pembelajaran di sejumlah lembaga pendidikan.

Surau Jabal Rahmah di Kabupaten 50 Kota dan Paud Azzahra di Batang Anai Padang Pariaman merupakan dua lembaga yang pada masa reses persidangan II tahun sidang 2020-2021 dikunjungi Nevi sekaligus menyerahkan bantuannya.

Bantuan dana yang oleh Nevi usahakan dengan berbagai lembaga ini berkisar antara 50 juta hingga 60 juta. Diharapkan dengan anggaran yang ada, dapat optimal untuk kemajuan kualitas pendidikan di daerah.

"Banyak sekali potensi anak-anak didik di daerah yang tidak termonitor dimana

kemampuan mereka sangat besar jika dikembangkan.

Berbagai fasilitas yang minim sedikit banyak menghambat pengembangan potensinya. Untuk itu, pemerataan pembangunan pendidikan mesti dilakukan secara serius dengan salah satunya model bantuan seperti ini. Semoga seluruh wilayah Indonesia hingga pelosok, akan terfasilitasi instrumen pendidikan termasuk kesehatan sehingga negara ini dapat layak disebut negeri makmur yang diberkati", Urai Nevi Zuairina.

Legislator PKS ini mengatakan, pada tahun kedua

kinerjanya sebagai anggota DPR, ia sudah menyusun berbagai agenda kemasyarakatan yang akan ia kerjakan secara serius sehingga ada dampak perubahan yang terjadi di masyarakat Sumbar terutama di daerah pemilihannya.

Target yang Politisi Perempuan Sumbar ini canangkan adalah pencapaian kinerjanya mesti lebih baik dari 1 tahun lalu masa pengabdianya sebagai anggota DPR.

"Saya akan berusaha keras untuk lebih baik dari masa ke masa dalam menjalankan tugas di DPR ini. Mohon doa kerjasama semua pihak terutama masyarakat dan tokoh di Sumbar. Semoga segala akitifitas kita diridhoi oleh Allah SWT, sehingga sumbar menjadi negeri yang makmur dan sejahtera", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Banyak sekali potensi anak-anak didik di daerah yang tidak termonitor dimana kemampuan mereka sangat besar jika dikembangkan. Berbagai fasilitas yang minim sedikit banyak menghambat pengembangan potensinya. Untuk itu, pemerataan pembangunan pendidikan mesti dilakukan secara serius dengan salah satunya model bantuan seperti ini

Masa Reses, Fikri Serahkan Bantuan Mobil Layanan

Kabupaten Tegal (18/12) — Anggota DPR RI Dapil IX Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih menyerahkan bantuan mobil untuk pelayanan masyarakat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Jumat (18/12).

“Mobil layanan ini sudah dibranding dengan logo PKS yang baru, sehingga masyarakat di Kabupaten Tegal khususnya, akan lebih mengenal PKS dengan logo baru, tapi tetap dengan karakter khas PKS yang lama, yakni senantiasa hadir melayani masyarakat,” kata dia.

Fikri juga berharap karakter melayani tetap menjadi ciri khas kader PKS di setiap jenjang kepengurusan mulai dari pusat hingga ke kelurahan/ desa.

“Harapannya, mobil ini akan membantu pengurus dan kader PKS lebih dekat lagi dengan masyarakat,” imbuh Ketua DPW PKS Jawa Tengah ini.

Pria yang lahir di Slawi, Kabupaten Tegal ini mengingatkan, agar kader senantiasa sejalan dengan garis kebijakan PKS untuk menebarkan kemalahaan dan nilai kebaikan di tengah masyarakat, sehingga

tercapai cita-cita mulia menjadi rahmat bagi semua.

“Sebagaimana Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, kader PKS akan membuktikan cintanya kepada Allah dengan mencintai sesama manusia,” tutur Fikri.

Mobil tersebut langsung diterima oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal, Arif Budiono beserta segenap jajaran pengurus.

“Support itu untuk memacu kami dalam rangka mencapai DPC dan DPRa 100 persen di seluruh Kabupaten Tegal,” ujar Arif optimis.

Anggota DPRD Kabupaten Tegal terpilih ini juga menambahkan, penguatan struktur dan kader tengah digalakkan, disamping revitalisasi perangkat pendukung, seperti pengadaan mobil dan rehab gedung.

“PKS di Kabupaten Tegal terus berbenah menyongsong kemenangan di sektor ruhiyah kader, sehingga kemenangan sejatinya hanya milik Allah SWT, bila kami dikasih amanah untuk memimpin Kabupaten Tegal, itu hanyalah bonus semata,” tutupnya.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

“Mobil layanan ini sudah dibranding dengan logo PKS yang baru, sehingga masyarakat di Kabupaten Tegal khususnya, akan lebih mengenal PKS dengan logo baru, tapi tetap dengan karakter khas PKS yang lama, yakni senantiasa hadir melayani masyarakat

Masa Reses, Anggota FPKS Bagikan Benih Padi di Geger Bitung Sukabumi

KUTIPAN

Sukabumi (18/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet membagikan bantuan benih padi kepada para petani di Sukabumi.

Pembagian bantuan benih ini dilakukan di Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Jumat (18/12).

"Benih ini tentu semoga bisa membantu para petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Terutama di tengah Pandemi Covid-19 ini," kata Slamet usai acara pembagian benih tersebut dilakukan.

Acara pembagian benih padi yang juga masih dalam agenda reses ini, turut dihadiri kelompok tani di Desa Cijurey dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gegerbitung.

Dalam kesempatan ini, Slamet juga menyoroti ihwal

belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap penyuluh pertanian lapangan (PPL). Padahal PPL ini menjadi ujung tombak dalam sektor pertanian di Indonesia.

"Sektor pertanian itu kan selalu diperlukan setiap saat. Terutama saat pandemi ini, satu-satunya sektor yang bisa memberikan pemasukan kepada negara, ya pertanian. Makanya kita mesti serius memikirkan kesejahteraan para PPL ini," jelasnya.

Slamet juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang kerap melakukan aktivitas impor di saat produksi pertanian dalam negeri terbilang cukup.

"Kebijakan pemerintah pun harus sama-sama kita kawal. Karena jangan sampai ketika petani lokal kita memproduksi suatu komoditas, karena akhirnya tidak terserap karena pemerintah justru impor dari luar negeri," pungkasnya.



drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

"Sektor pertanian itu kan selalu diperlukan setiap saat. Terutama saat pandemi ini, satu-satunya sektor yang bisa memberikan pemasukan kepada negara, ya pertanian. Makanya kita mesti serius memikirkan kesejahteraan para PPL ini,"





*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Letjen TNI Herman Asaribab

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat

Semoga semua kebaikan
Almarhum diterima di sisi Tuhan YME,
Semoga keluarga yang ditinggalkan
diberikan kekuatan.



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Peringati Hari HAM Se-Dunia

HNW: Jangan Hanya Seremonial, Usut Tuntas Penembakan 6 Laskar FPI

KUTIPAN

Jakarta (10/12) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, meminta agar seluruh komponen bangsa, termasuk Pemerintah

saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember ini, melakukannya dengan serius dan jujur membareksi akses pengusutan seluas-luasnya oleh Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM penembakan anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian.

“Peringatan hari HAM tahun ini seharusnya tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi penting dilakukan dengan lebih bermakna, memberikan akses yang nyata untuk dapat mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian terkait penembakan 6 laskar FPI,” ujarnya melalui

siaran pers di Jakarta, Kamis (10/12).

HNW sapaan akrabnya berharap agar Tim Pencari Fakta (TPF) Independen yang bisa dipimpin oleh Komnas HAM segera dibentuk, dengan melibatkan para pemangku independen lainnya. Sejumlah kalangan, seperti dari Ormas (Muhammadiyah, ICMI dan lain-lain), Parpol (PKS, PPP dan lain-lain) LSM (Amnesty International Indonesia, YLBHI, IPW dan lain-lain), dan sejumlah anggota DPR RI sudah mengutarakan hal yang serupa.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, desakan

sejumlah kalangan itu dapat dipahami karena penembakan 6 warga sipil tersebut disebut sebagian pakar sebagai aksi extra judicial killing. Apabila merujuk kepada Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, extra judicial killing tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat.

“TPF Independen harusnya segera dibentuk, agar segera kuatkan dan beri akses yang luas kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM terhadap 6 laskar FPI yang menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan masyarakat Internasional” tuturnya.

HNW menambahkan pihaknya juga mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI untuk pengusutan secara tuntas kasus pelanggaran HAM ini, dan melengkapi pengusutan oleh Komnas HAM.

“Sebagai lembaga perwakilan Rakyat, wajarnya rekan-rekan anggota di Komisi IIDPRRI yang bermitra dengan Kepolisian untuk membentuk Pansus terkait hal ini di DPR,” tukas Anggota Komisi VIII yang mibidangi urusan keagamaan di DPR RI ini.

Lebih lanjut, HNW mengutarakan bahwa sejumlah pasal berkaitan dengan HAM telah hadir pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945, dan itu bukan hanya sekadar



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

“TPF Independen harusnya segera dibentuk, agar segera kuatkan dan beri akses yang luas kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM terhadap 6 laskar FPI yang menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan masyarakat Internasional”

untuk menjadi ‘macan kertas’, tetapi harusnya bisa ditegakkan. Salah satunya adalah Pasal 28I UUD 1945 yang mencantumkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).

“Penembakan terhadap 6 anggota FPI yang berujung kepada kematian itu merupakan bentuk terhadap pelanggaran HAM karena menghilangkan hak hidup yang tak dapat dikurangi tersebut,” tukasnya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Ketua MKD DPR RI



“Berbuat adil dan mewujudkan kesejahteraan bentuk manifestasi bela negara.”



Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 FPKS DPR RI

KUTIPAN

Tidak salah juga disebut Buku Putih, sebab ia ada diawali dengan niat bersih, pikiran jernih, dan keinginan mulia berkontribusi untuk negeri.

Sinopsis

Pandemi Covid-19 tentu tidak bisa kita lihat sebagai persoalan di bidang kesehatan semata karena telah berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Krisis multi dimensi ini telah menjadi batu ujian ketahanan nasional kita.

Kemampuan kita sebagai bangsa dalam mengelola wabah pandemi Covid-19 akan sangat menentukan rute perjalanan sejarah bangsa Indonesia di masa mendatang.

Oleh karena itu, bangsa ini harus memiliki kesamaan pandangan untuk memitigasi kerusakan yang ditimbulkan oleh wabah, demi mempercepat pemulihan sistem

kesehatan dan sistem ekonomi nasional di masa mendatang.

Buku ini adalah sebutuk tanggung jawab Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI untuk mengambil bagian dalam penanganan pandemi di Indonesia.

Isinya mendeskripsikan secara cukup komprehensif mengenai persoalan dan implikasi yang muncul, kebijakan yang diambil pemerintah, sikap dan

partisipasi masyarakat, pola komunikasi yang dibangun dalam proses penanganan Covid-19 hingga komparasi penanganan pandemi di berbagai negara.

Tidak salah juga disebut Buku Putih, sebab ia ada diawali dengan niat bersih, pikiran jernih, dan keinginan mulia berkontribusi untuk negeri.

Agenda Bedah Buku

Bedah Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Pandemi Covid-19 tentu tidak bisa kita lihat sebagai persoalan di bidang kesehatan semata karena telah



berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan politik. Krisis multidimensi ini telah menjadi batu ujian ketahanan nasional. Kemampuan kita sebagai bangsa dalam mengelola wabah pandemi Covid-19 akan menentukan rute perjalanan sejarah bangsa Indonesia di masa mendatang.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera didukung oleh Perpustakaan DPR RI menggelar Bedah Buku dengan tema: **BUKU PUTIH PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

yang akan dilaksanakan pada Kamis, 17 Desember 2020 di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270 pada pk. 09.00 WIB.

Acara ini menghadirkan Dr. Hj. Netty Prasetyani M. Si. (Ketua Tim Covid-19 FPKS & Anggota komisi IX DPR RI), Letjen TNI (purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (Menkes) Letjen Doni Monardo (Kepala BNPB), Serta Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM. (Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (LAKMI) Pusat

Presiden PKS Apresiasi Buku Putih Penanganan Covid-19 FPKS DPR RI

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhul Muchlisin memberikan apresiasi atas hadirnya Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 oleh F-PKS DPR RI.

Syaikhul Muchlisin mengatakan, Buku Putih ini akan menjadi catatan dan masukan sebagai bahan kajian dan diskusi pemangku kebijakan agar lebih tepat dalam penanganan Covid-19.

"Mudah-mudahan dengan diskusi dan peluncuran buku ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan masukan ini bisa diambil sebagai langkah kebijakan konkrit pada masa mendatang," ujar Syaikhul Muchlisin dalam paparannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Syaikhul Muchlisin menyebut, Covid-19 adalah peristiwa bersejarah dan menjadi satu fenomena global. Di Indonesia, angka grafik

konfirmasi positif Covid-19 hingga hari ini belum turun dan bahkan memunculkan sejumlah rekor baru.

"Misalnya pada Rabu 16 Desember 2020, jumlah kasus positif lebih dari 600 ribu di Indonesia dengan angka kematian sekitar 18 ribu. Kalau di Asia Tenggara tingkat fatality rate kita tertinggi sekitar 3,3 persen. Ini harus jadi warning dan perhatian khususnya pemangku kepentingan atau pemerintah," paparnya.

Syaikhul Muchlisin mengakui semua pihak tidak menyangka akan hadirnya pandemi ini. Namun, pada awal-awal masyarakat justru disuguhkan dengan candaan para elite yang

menyebut Covid-19 tidak mungkin masuk ke Indonesia.

"Sehingga masyarakat mendapat kesan bahwa situasinya aman. Nyatanya begitu ada kasus dimulai dari Depok, pemerintah seperti agak gagap menyelenggarakan kebijakan dalam mengatasi pandemi ini," paparnya.

Syaikhul Muchlisin menekankan, Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi. Tetapi juga politik hingga ketahanan nasional.

Ia menyitir dalam diskusi badan kajian MPR RI, ada penurunan indeks ketahanan nasional akibat Covid-19 dari 2,6 poin menjadi 2,2 poin.

"Artinya daya tahan bangsa kita semakin menurun. Jika hal ini terus terjadi tentu akan memunculkan faktor yang sangat merugikan bangsa kita," sebut dia.

Hadir dalam peluncuran Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 oleh F-PKS DPR RI, Presiden PKS Ahmad Syaikhul Muchlisin, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini Ketua Tim Covid-19 FPKS Netty Presetyani, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Epidemiolog Dr Ede Surya Darmawan.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

Mudah-mudahan dengan diskusi dan peluncuran buku ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan masukan ini bisa diambil sebagai langkah kebijakan konkrit pada masa mendatang."

Luncurkan Buku Putih
Penanganan Covid-19,

Netty: Pandemi Harus Dilawan dengan Kolaborasi Optimal

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Fraksi PKS DPR RI didukung Perpustakaan DPR RI meluncurkan Buku Putih Penanganan Covid-19 di Indonesia pada Kamis, (17/12/2020) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara III DPR RI.

Ketua Tim Penyusun yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetyani Aher mengatakan, buku ini merupakan sebuat tanggung jawab Fraksi PKS dalam berkontribusi menangani pandemi Covid-19.

"Buku ini merupakan kumpulan ide dan gagasan sebagai respon terhadap wabah, sekaligus menjadi sumbangsih dan tanggung jawab PKS dalam menangani pandemi. Kami berharap buku ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," kata Netty dalam paparannya.

Netty juga menyampaikan

bahwa buku ini juga mendorong agar terjadinya kolaborasi optimal seluruh elemen bangsa dalam bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19.

"Kunci keberhasilan penanganan Covid-19, salah satunya adalah, harus dilakukannya kolaborasi optimal. Hadirnya Menteri Kesehatan dalam acara ini, juga Kepala BNPB, bersanding dengan Fraksi PKS, semoga menjadi salah satu wujud dari kolaborasi optimal," kata Netty.

Menurut Netty, meskipun PKS menegaskan diri sebagai partai oposisi, bukan berarti

PKS asal beda dengan pemerintah.

"PKS tetap harus menunjukkan kontribusi konstruktif untuk kemajuan bangsa, termasuk dalam penanganan pandemi," paparnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hadir sebagai pembicara juga menyampaikan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan bersama-sama.

"Penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Netty tadi, tidak bisa sendiri tapi memerlukan banyak pihak tidak terkecuali partai politik. Buku putih penanganan Covid-19 memberikan gambaran kolaborasi akan penanganan Covid-19" katanya.

Buku ini disusun oleh Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI dan The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) terdiri dari sepuluh bab yang membahas penanganan pandemi Covid-19 dari berbagai aspek.

"Salah satu bab membahas tentang prediksi akhir pandemi Covid-19 di Indonesia. Kalau hari ini orang lain sudah bicara second wave, kita justru masih belum tahu apakah gelombang pertama sudah sampai puncak atau belum," terang Netty.

"Buku ini juga membahas jurang persepsi antara kebijakan pemerintah dengan harapan publik. Juga masalah komunikasi publik yang tidak



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI

Buku ini merupakan kumpulan ide dan gagasan sebagai respon terhadap wabah, sekaligus menjadi sumbangsih dan tanggung jawab PKS dalam menangani pandemi. Kami berharap buku ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

terkelola dengan baik sehingga masyarakat terfragmentasi antara yang menganggap penyakit ini serius dengan yang menganggap ini biasa-biasa saja," tambahnya.

Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, kata Netty, juga diulas.

"Pemerintah di awal

pandemi sempat mengamang apakah perlu menerapkan kebijakan karantina wilayah atau tidak, apakah perlu dilakukan serentak atau parsial per daerah. Dampak dari penerapan PSBB terhadap mobilitas masyarakat, penyebaran virus dan lainnya pun perlu dikaji secara menyeluruh" kata Netty.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***